



DINAMIKA KEHIDUPAN SOSIAL - EKONOMI ETNIS TIONGHOA DI  
MAKASSAR PADA MASA ORDE BARU (1966-1998)

SKRIPSI

Oleh:  
Kinanthi Nisful Laily  
NIM. 110210302003

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016



DINAMIKA KEHIDUPAN SOSIAL -EKONOMI ETNIS TIONGHOA DI  
MAKASSAR PADA MASA ORDE BARU (1966-1998)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sejarah (SI)  
dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh:

Kinanthi Nisful Laily  
NIM. 110210302003

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Orang tua saya yang tercinta, yaitu ayahanda Sugiono dan ibunda Suwarni Esthi Supatmi.
2. Kakakku yang tercinta Galvani Setya Pratama dan Farahdila L.
3. Semua guruku mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan dosen FKIP Sejarah Universitas Jember yang telah memberikan sumbangan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.
4. Teman-teman Keluarga Besar Mahasiswa Sejarah (Kelamas) khususnya angkatan 2011.
5. Teman-teman Green kos Jalan Halmahera III nomor 10 atas bantuan dan dukungannya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh semangat.
6. Almamater yang kubanggakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

## MOTTO

“Anda tidak akan pernah tahu seberapa kuatnya anda sampai pada akhirnya anda hanya mempunyai satu pilihan, yaitu harus menjadi kuat”

(Merry Riana) <sup>\*)1</sup>



---

<sup>\*)</sup> <http://indoseowap.blogspot.co.id/2014/01/kumpulan-motivasi-dari-merry-riana.html>

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kinanthi Nisful Laily

NIM : 110210302003

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Dinamika Kehidupan Sosial-Ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar pada Masa Orde Baru (1966-1998)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan.

Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi karya ilmiah ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian, karya ilmiah ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2016

Yang menyatakan,

Kinanthi Nisful Laily

NIM. 110210302003

**SKRIPSI**

**DINAMIKA KEHIDUPAN SOSIAL-EKONOMI ETNIS TIONGHOA DI  
MAKASSAR PADA MASA ORDE BARU (1966-1998)**

Oleh

**Kinanthi Nisful Laily**

**NIM 110210302003**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Kayan Swastika, M.Si

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Dinamika Kehidupan Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar pada Masa Orde Baru (1966-1998)” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada:

hari, tanggal :

tempat :

Tim Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Bambang Soepeno, M. Pd  
NIP 196006121987021001

Drs. Kayan Swastika, M.Si  
NIP196702102002121002

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Marjono, M.Hum  
NIP 196004221988021001

Drs. Sumarjono, M.Si  
NIP 195808231987021001

Mengesahkan

Dekan,

Prof. Dr. Sunardi, M.Pd  
NIP 195405011983031005

## RINGKASAN

**“Dinamika Kehidupan Sosial-Ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar pada Masa Orde Baru (1966-1998)”**; Kinanthi Nisful Laily, 110210302003; 2016: xiii+102 halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah; Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; Universitas Jember.

Permasalahan yang ditemukan di Makassar dari tahun ketahun yang terbilang menarik untuk dikaji adalah mengenai kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi yang talik ulur. Tarik ulur disini dikarenakan ada kendala yang didapat juga ada keuntungan yang diterima.

Permasalahan dalam penelitian ini antara lain adalah: (1) bagaimana kondisi sosial-ekonomi etnis Tionghoa di Makassar menjelang Orde Baru; (2) bagaimana perkembangan, perubahan, dan kesinambungan kondisi sosial-ekonomi etnis Tionghoa di Makassar pada masa Orde Baru (1966-1998); dan (3) apa nilai dan norma yang terkandung pada sosial-ekonomi etnisTionghoa di Makassar pada masa Orde Baru (1966-1998).

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengkaji kondisi sosial-ekonomi etnis Tionghoa di Makassar menjelang Orde Baru; mengkaji perkembangan, perubahan, dan kesinambungan kondisi sosial-ekonomi etnik Tioghoa di Makassar pada masa Orde Baru (1966-1998); dan mengkaji nilai dan norma yang terkandung pada sosial-ekonomi etnisTionghoa di Makassar pada masa Orde Baru (1966-1998).

Manfaat dalam penelitian ini adalah (1) bagi mahasiswa, dapat menambah pengetahuan dan menjadi pendorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut;(2) bagi pembaca, dapat menambah wawasan mengenai keanekaragaman etnis yang ada di Indonesia, khususnya Etnis Tionghoa yang ada di Makassar;(3) bagi ilmu sejarah, dapat memperkaya kajian sejarah lokal, khususnya mengenai kondisi Etnis Tionghoa di Makassar; dan (4) bagi almamater Universitas Jember, dapat



menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan masalah sosial budaya masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Sejarah. Langkah-langkah dalam Penelitian Sejarah adalah Pemilihan Topik, *Heuristik*, Kritik, Interpretasi, dan *Historiografi*. Penulis menggunakan pendekatan sosiologi serta menggunakan Teori Pergerakan Sosial menurut Smelser (1962).

Kebijakan Sosial-Ekonomi rezim Orde Lama, terutama yang berkaitan dengan Etnis Tionghoa adalah berkembangnya perekonomian etnis Tionghoa yang pada saat itu mengalami kemudahan dikarenakan adanya kebijakan bagi Etnis Tionghoa yang bersifat pasif.

Keadaan Etnis Tionghoa pada masa Orde Baru memiliki kendala keberadaan Etnis Tionghoa sendiri tidak mudah diterima dimasyarakat pribumi. Dimulai dengan status sosial yang mulai tidak diterima dan juga masalah persaingan ekonomi yang terjadi di Makassar.

Perkembangan Etnis Tionghoa dari tahun ke tahun juga merubah nilai dan norma yang telah diyakini. Etnis Tionghoa sendiri dalam berusaha memiliki nilai-nilai positif diantaranya, Tidak putus asa, modern dan Konsep Jien, Gie, Lee, Ti dan Sin.

Saran yang diberikan oleh penulis adalah: (1) bagi pemerintah, pemerintah hendaknya lebih mengawasi kebijakan-kebijakan yang diciptakan agar sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh semua pihak; (2) Bagi masyarakat luas, masyarakat seharusnya lebih memahami arti persamaan dan memelihara hubungan baik antar sesama. Jangan gunakan konflik antar golongan yang pernah terjadi sebagai pemicu perpecahan, namun gunakan untuk lebih memahami hak asasi setiap manusia, setiap golongan.

Simpulan dari penelitian ini adalah Etnis Tionghoa pada masa Orde Baru mengalami pembatasan dalam hal berekspresi dan juga dalam bidang ekonomi, hal ini guna menjaga kebudayaan dari Indonesia.

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Dinamika Kehidupan Sosial-Ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar pada Masa Orde Baru (1966-1998)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (SI) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc, Ph.D, selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Dr. Sunardi, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
3. Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, serta pengarahan yang sangat berguna hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Drs. Kayan Swastika, M.Si, selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Dr. Nurul Umamah, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah;
6. Dr. Moh. Na'im, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat berharga selama menempuh studi di Pendidikan Sejarah;
8. Kedua orang tuaku Ayahanda Sugiono dan Suwarni Esthi Supatmi yang senantiasa tiada kenal lelah dalam memberi kasih sayang, mendidik, memberikan doa, dan memberikan motivasi selama ini;
9. Kakakku Galvani Setya Pratama dan Farahdila Lailatul Q, serta seluruh keluargaku yang terus memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini;
10. Teman-Teman yang kubanggakan Fregat Yoro Putra, Veni, Lutfi, Kiki, Afan, Fahreza Erico, Nanin, Anas, Yanti, Olive, Reni, Totok, Yayak, Hikmah, mas

Zen serta Keluarga Besar Mahasiswa Sejarah (Kelamas) khususnya angkatan 2011 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh semangat;serta

11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian karya tulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Setiap karya yang dihasilkan manusia pastilah mempunyai kelebihan dan kekurangan, maka dari itu penulis menerima dengan tangan terbuka segala bentuk kritik yang membangun demi lebih sempurnanya skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua,amin.

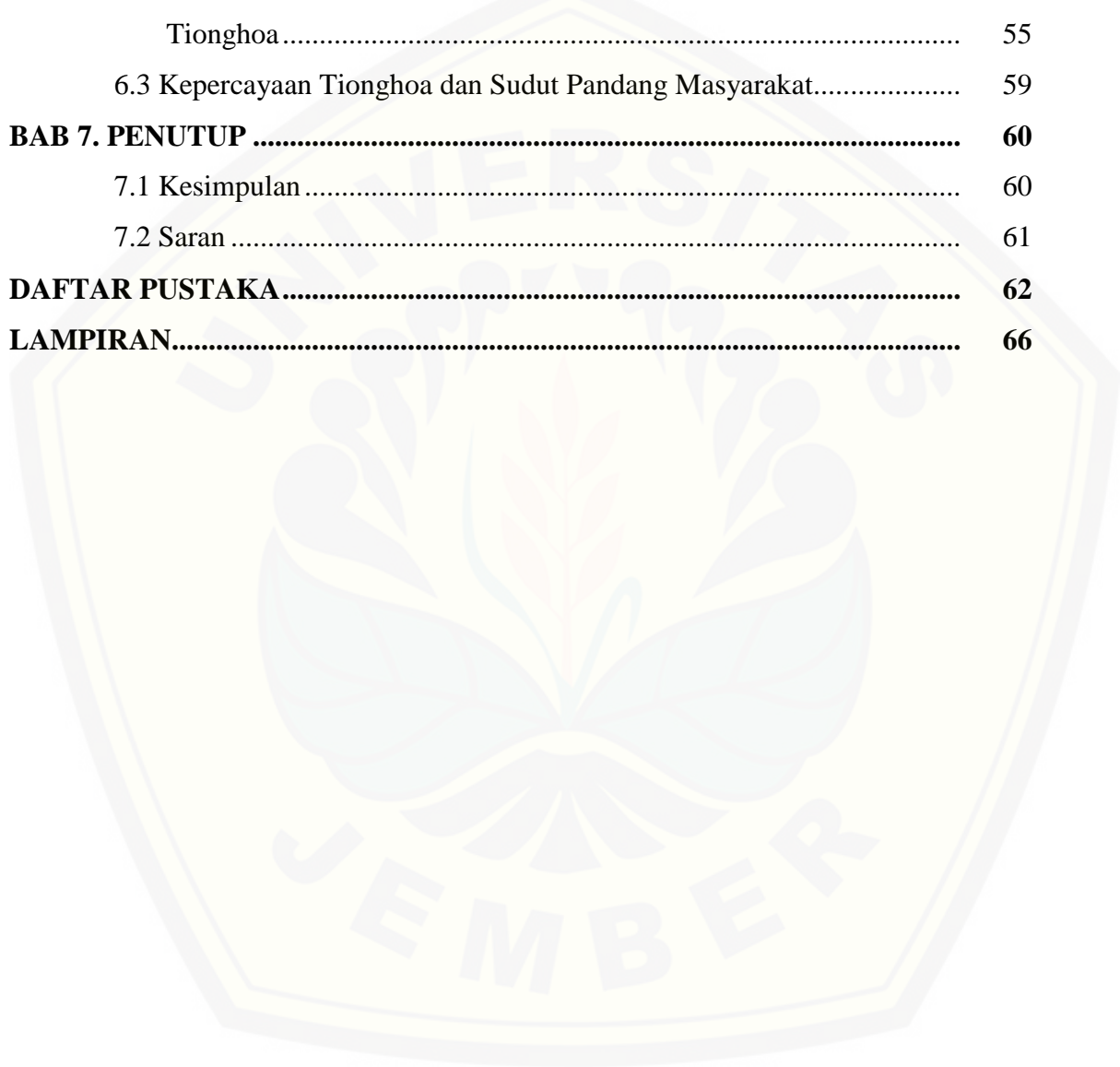
Jember,

Penulis

DAFTAR ISI

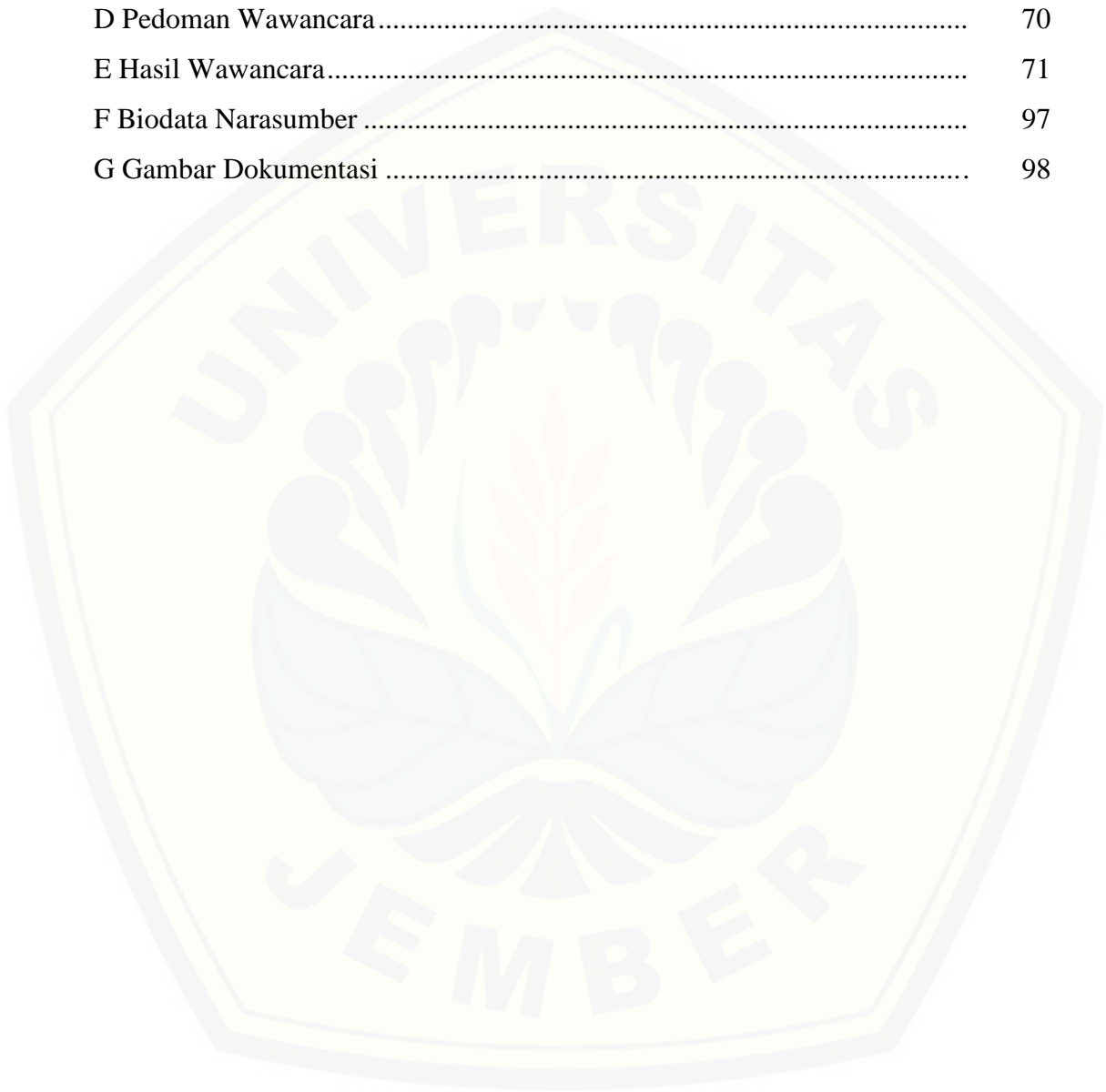
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Penegasan Judul .....	5
1.3 Ruang Lingkup.....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	7
1.5 Tujuan Penelitian .....	7
1.6 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>17</b>
<b>BAB 4. KONDISI SOSIAL-EKONOMI ETNIS TIONGHOA di MAKASSAR     MENJELANG ORDE BARU .....</b>	<b>24</b>
4.1 Kehidupan Sosial Etnis Tionghoa .....	24
4.2 Kehidupan Ekonomi Etnis Tionghoa.....	31
<b>BAB 5. PERUBAHAN, PERKEMBANGAN, DAN KESINAMBUNGAN     KEHIDUPAN SOSIAL-EKONOMI ETNIS TIONGHOA DI     MAKASSAR PADA MASA ORDE BARU (1966-1998).....</b>	<b>33</b>
5.1 Perubahan Kehidupan Sosial-Ekonomi Etnis Tionghoa.....	33
5.2 Perkembangan Kehidupan Sosial-Ekonomi Etnis Tionghoa.....	39

5.3 Kestinambungan Kehidupan Sosial-Ekonomi Etnis Tionghoa .....	48
<b>BAB 6. NILAI DAN NORMA YANG TERKANDUNG PADA ETNIS TIONGHOA Di MAKASSAR PADA MASA ORDE BARU (1966-1998) .....</b>	<b>51</b>
6.1 Nilai dan Norma Etnis Tionghoa.....	51
6.2 Pandangan Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Etnis Tionghoa .....	55
6.3 Kepercayaan Tionghoa dan Sudut Pandang Masyarakat.....	59
<b>BAB 7. PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
7.1 Kesimpulan .....	60
7.2 Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>



**DAFTAR LAMPIRAN**

A Matriks Penelitian.....	66
B Peta Makassar.....	68
C Peta Distribusi Daerah Asal Leluhur Suku Tionghoa-Indonesia .....	69
D Pedoman Wawancara.....	70
E Hasil Wawancara.....	71
F Biodata Narasumber .....	97
G Gambar Dokumentasi .....	98



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Pemilihan Masalah

Di Indonesia ke-bhinekaan masyarakat sangat menonjol, bukan saja kelompok dalam kesatuan-kesatuan berdasarkan agama, tetapi juga dalam etnis: Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, Batak, Bali, Betawi, Layu, Banjar, Aceh, Dayak, Makasar, Tionghoa, Arab, dan suku lainnya. Setiap etnis memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dari segi bahasa, identitas kultural, maupun adat istiadat, tetapi terikat oleh suatu kepentingan bersama bersifat formal dalam bentuk sebuah Negara (Chandra Setiawan 2008 :213).

Dari berbagai golongan yang ada di Indonesia, golongan Tionghoa merupakan golongan yang telah lama tinggal di Indonesia. Golongan Tionghoa seperti yang tercantum dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan sebagai peranakan Tionghoa. Jumlah golongan Tionghoa di Indonesia pada tahun 2014 diperkirakan 5% dari penduduk Indonesia yang pada saat itu berjumlah 250 juta jiwa, yang berarti sedikitnya ada 12 juta golongan Tionghoa yang tersebar hampir di semua kota di seluruh Indonesia. Keberadaan Etnis Tionghoa yang terbilang sedikit di Nusantara ini.

Masyarakat Tionghoa datang ke Indonesia khususnya di Makassar diperkirakan pada abad ke 17 (Yerry, 2013:9). Gelombang pendatang Cina terbesar terjadi pada abad ke-16 sampai abad ke-19, terutama mereka yang berasal dari suku-suku bangsa berbahasa *Hokkien* dari Provinsi Fukien bagian selatan. Para perantau ini memiliki keterampilan berdagang melintasi laut sejak berabad-abad yang lalu. Etnis Tionghoa yang merantau umumnya memandang tinggi sifat rajin, hemat, mandiri, dan memiliki semangat berusaha yang tinggi. Itulah sebabnya Etnis Tionghoa banyak berhasil dalam bidang ekonomi di negara-negara yang kaya sumber daya alamnya. Suku Bangsa *Tiu-Chiu* dan *Hakka (Khek)* berasal dari Provinsi Kwang-tung (lihat lampiran D). Di daerah asalnya, *Orang Tiu-Chiu* berdiam di daerah tandus yang miskin di pedalaman. Di Indonesia Etnis Tionghoa ini dipekerjakan Belanda sebagai kuli di perkebunan dan pertambangan,

seperti di Sumatera Timur, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat. Sedangkan *Orang Hakka* lebih suka berjuang di sektor perdagangan. Kebanyakan Orang Tionghoa datang ke Jawa Barat dan Jakarta untuk berdagang sejak abad ke-19. *Orang Kanton* pada mulanya banyak bekerja di tambang timah di Pulau Bangka. Tapi karena memiliki keterampilan di bidang pertukangan kayu dan besi, akhirnya Etnis Tionghoa tersebar ke mana-mana. Di masa sekarang kelompok ini biasanya hidup sebagai pemilik toko alat-alat kayu dan besi atau menjadi pengusaha industri kecil. Sebenarnya wilayah Fukien ini memiliki tanah yang kurang subur dibandingkan dengan wilayah di Tiongkok. Daerah Fukien ini banyak dikuasai oleh tuan-tuan tanah untuk usaha pertanian. Tanah-tanah yang ada di daerah Fukien ini semakin sempit, selain itu sering terjadi perang saudara dan serangan dari Bangsa Mongol. Penduduk dari daerah Fukien ini pada umumnya bermata pencaharian sebagai pedagang, petani, dan pengrajin. (La Ode, 1997:97).

Pada tahun 2015 Harun Research institute merilis daftar orang terkaya di Indonesia. Dari 24 orang terkaya di Indonesia kebanyakan orang Cina yang menduduki tingkat tersebut. Keberhasilan menuju ketahap ini diyakini karena adanya sifat saling membantu antar sesama Etnis Tionghoa. Sosial ekonomi yang dipegang teguh oleh Etnis Tionghoa tidak pernah luntur walaupun mengalami asimilasi dengan masyarakat sekitar. Keberhasilan ini bisa dilihat dimulai masa kolonial yang berkembang lambat laun walaupun sempat mengalami kendala pada masa Orde Lama, namun sosial-ekonomi setelah Orde Lama atau tepatnya masa Orde Baru mengalami keberhasilan dengan seiring waktu.

Makassar sebagai ibukota Sulawesi Selatan juga merupakan pintu gerbang dan pusat perdagangan kawasan timur Indonesia. Secara geografis Kota Makassar terletak di pesisir pantai bagian barat Provinsi Sulawesi Selatan pada titik koordinat 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan. Secara administratif Kota Makassar mempunyai batas-batas wilayah yaitu sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Topografi Kota Makassar pada umumnya berupa daerah pantai. Ketinggian Kota Makassar berkisar 0,5–10 meter di atas



permukaan laut. Secara demografi, jumlah penduduk yang mendiami kota Makassar menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2010 adalah 1.339.374 jiwa (Badan Pusat statistik Makassar, 2010:2-3)

Kota Makassar saat ini dihuni berbagai macam etnis bangsa, mulai dari Etnis Makassar, Etnis Bugis, Etnis Toraja, Etnis Mandar, sampai Etnis Tionghoa. Persentase jumlah penduduk Suku Bugis di Sulawesi Selatan adalah sekitar 62,5%, Suku Makassar sekitar 26,7%, dan sisanya 10,7 % adalah etnis lainnya. Persentase suku lain selain kedua suku di atas sangatlah kecil. Suku Bugis adalah suku yang tergolong dalam suku *Deutro Melayu* (Mattullada, 1974)

Seperti yang telah diuraikan di atas mengenai persentase jumlah penduduk, Etnis Tionghoa di Sulawesi Selatan berjumlah relatif sedikit apabila dibandingkan dengan etnis-etnis lainnya. Jumlah etnis Tionghoa sendiri di Makassar yaitu sekitar 3% dari penduduk yang mendiami Makassar (Suryadinata, 2002:11). Keberadaan Etnis Tionghoa sendiri di Makassar merupakan etnis minoritas. Walaupun dianggap sebagai etnis minoritas, Etnis Tionghoa ini memiliki peranan yang penting terhadap perkembangan Makassar pada masa Orde Baru. Perkembangan terpenting yang diberikan Etnis Tionghoa antara lain semakin meningkatnya ekonomi rakyat Makassar yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai pedagang.

Keberadaan etnis bangsa yang beraneka ragam ini memicu kemajuan yang sangat menguntungkan bagi masyarakat Makassar. Kemajuan ini bisa dilihat dari berkembang pesatnya infrastruktur yang melengkapi kota tersebut. Dimulai dengan membaiknya sarana dan prasarana yang cukup lengkap, toko-toko berjajaran, pendidikan semakin diutamakan, nilai ekonomi yang diperhatikan, dan lain sebagainya.

Permasalahan yang ditemukan di Makassar dari tahun ketahun yang terbilang menarik untuk dikaji adalah mengenai kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi yang talik ulur. Tarik ulur disini dikarenakan ada kendala yang didapat juga ada keuntungan yang diterima. Etnis Tionghoa di Makassar mampu untuk melalui masa-masa tersebut karena memiliki nilai-nilai yang berpegang teguh oleh dirinya sebagai etnis pendatang yang mengadu nasib di perantauan. Masa-

masa yang sulit yaitu pada masa transisi Orde Lama ke Orde Baru adalah ketentuan-ketentuan untuk kehidupan Etnis Tionghoa di rubah-rubah. Pemerintah sendiri dalam pembuatan keputusan ini juga didasari oleh keadaan masyarakat setempat yang pada saat itu mengalami kendala dengan adanya etnis pendatang yaitu Etnis Tionghoa.

Pemahaman penulis terhadap permasalahan yang ada di Makassar yaitu mengenai suatu kondisi sosial-ekonomi yang terjadi pada Etnis Tionghoa bila dikaji dengan teori perubahan sosial menurut Smelser dirasa cukup memadai. Menurut Smelser sendiri perubahan sosial berisikan mengenai upaya kolektif untuk mengubah norma dan nilai (dalam Sztompka, 2005:325). Norma bersifat lebih spesifik daripada nilai. Norma bisa bersifat formal, seperti ditemukan dalam peraturan hukum, bisa juga bersifat informal. Namun nilai dan norma saja belum cukup untuk menentukan bentuk organisasi tindakan manusia seperti: siapa yang menjadi pelaksana upaya pencapaian tujuan ini dan bagaimana tindakan-tindakan para pelaksana ini distrukturkan dalam peran dan organisasi. Mobilisasi motivasi ke dalam tindakan terorganisasi adalah komponen ketiga untuk mewujudkan tujuan nilai dan norma tadi.

Ketertarikan penulis dalam membahas persoalan ini, adalah penulis berharap mengetahui kondisi Etnis Tionghoa yang ada di Makassar pada masa Orde Baru, yaitu berkisar pada tahun 1966-1998 secara detail. Yang menjadi sorotan di sini adalah beberapa ketegangan yang terjadi di Makassar pada awal masa Orde Baru dan peranan Etnis Tionghoa di Makassar. Dengan harapan nantinya semua permasalahan yang timbul pada masa Orde Baru (1966-1998) dapat diketahui kebenarannya. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis ingin mengkaji lebih dalam masalah ini, yang penulis rumuskan dalam karya tulis berjudul “Dinamika Kehidupan Sosial-Ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar pada Masa Orde Baru (1966-1998)”.

## 1.2 Penegasan Pengertian Judul

Demi menghindari adanya perbedaan penafsiran mengenai judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan atas judul “Dinamika Sosial-Ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar pada Masa Orde Baru (1966-1998)”.

Dinamika yaitu perubahan secara cepat atau lambat dan bisa diartikan perubahan secara besar atau kecil, dinamika adalah suatu kenyataan yang berhubungan dengan perubahan keadaan. Dinamika dibagi dalam tiga unsur yaitu perubahan, perkembangan dan kesinambungan. Perubahan mencakup perubahan kondisi Sosial-Ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar dari Orde Lama ke Orde Baru. Perkembangan mencakup perkembangan Sosial-Ekonomi di Makassar pada masa Orde Baru serta Kesinambungan mencakup aspek kesinambungan kehidupan Sosial-Ekonomi Etnis Tionghoa pada rentan waktu 1966-1998.

Menurut Slamet Santoso (2004:5), Dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi warga yang lain secara timbal balik. Dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok secara keseluruhan. Karenanya, dapat disimpulkan bahwa Dinamika ialah ke dinamisasi atau keteraturan yang jelas dalam hubungan secara psikologis.

Pengertian “sosial-ekonomi” jarang dibahas secara bersamaan. Pengertian “sosial” dan pengertian “ekonomi” sering dibahas secara terpisah. Pengertian “sosial” dalam ilmu sosial menunjuk pada objeknya yaitu masyarakat. Sedangkan menurut Kementerian Sosial, kata “sosial” menunjuk pada kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan yang ruang lingkupnya meliputi pekerjaan dan kesejahteraan sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “sosial” berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1958). Sedangkan dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan orang lain di sekitarnya, sehingga kata “sosial” sering diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat. Sedangkan istilah “ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani yaitu “oikos” yang berarti keluarga atau rumah tangga dan “nomos”

yaitu peraturan, aturan, hukum. Maka secara garis besar perubahan ekonomi yang dimaksudkan disini mengenai perubahan kondisi ekonomi, pekerjaan dan perkembangan suatu kelompok untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak dalam usaha yang dirintis atau yang dilakukan.

Berkaitan pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa “sosial-ekonomi” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kelompok, kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan dengan kebutuhan sosial (kehidupan yang layak) dan kebutuhan ekonomi (pekerjaan). Kedudukan sosial ekonomi seseorang sendiri menurut Melly G. Tan bisa diklasifikasikan dengan melihat pekerjaan, penghasilan, pendidikan dan kehidupan sosial. Berdasarkan klasifikasi tersebut masyarakat dapat digolongkan dalam kedudukan sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi (dalam Koentjaraningrat, 1981:35)

Mely G Tan (2008) berpendapat istilah “Etnis Tionghoa” mengacu pada sebuah kelompok orang dengan elemen budaya yang dikenali sebagai atau dapat disebabkan oleh budaya Tionghoa. Kelompok tersebut secara sosial mengidentifikasi diri dengan atau diidentifikasi oleh kelompok yang lainnya sebagai kelompok yang berbeda.

Orde Baru adalah tata pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia, berlangsung sejak tanggal 11 Maret 1966 hingga 20 Mei 1998. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menegaskan apa yang dimaksud dengan “Dinamika Kehidupan Sosial-Ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar pada Masa Orde Baru (1966-1998)” adalah suatu perubahan, perkembangan dan kesinambungan kehidupan sosial-ekonomi etnis Tionghoa di Makassar pada masa Orde Baru antara tahun 1966-1998.

### 1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan agar peneliti tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti. Untuk itu peneliti perlu membatasi permasalahan khususnya batasan tempat (spasial), waktu (temporal), dan fokus kajian.

Ruang lingkup tempat (spasial) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Ruang lingkup waktu (temporal) penelitian ini adalah tahun 1966-1998. Tahun 1966-1998 digunakan sebagai ruang lingkup arah penelitian karena tahun-tahun itu merupakan masa Orde Baru, yang menurut sumber sementara yang didapatkan, yaitu masa ketika Etnis Tionghoa banyak mengalami kesulitan hidup terutama yang berada di Makassar. Hal ini bisa dibuktikan dengan jumlah Etnis Tionghoa yang menetap di Makassar lebih sedikit dibandingkan dengan masa Orde Lama.

Fokus Kajian penelitian ini adalah etnis Tionghoa yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan ruang lingkup yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) bagaimana kehidupan sosial-ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar menjelang masa Orde Baru?;
- 2) bagaimana perkembangan, perubahan, dan kesinambungan kehidupan sosial-ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar pada masa Orde Baru (1966-1998)?; dan
- 3) apa nilai dan norma yang terkandung pada sosial-ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar pada masa Orde Baru (1966-1998)?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1) untuk mengkaji kondisi sosial-ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar menjelang Orde Baru;
- 2) untuk mengkaji perkembangan, perubahan, dan kesinambungan kondisi sosial-ekonomi etnis Tionghoa di Makassar pada masa Orde (1966-1998); dan
- 3) untuk mengkaji nilai dan norma yang terkandung pada sosial-ekonomi etnis Tionghoa di Makassar pada masa Orde Baru (1966-1998).

#### 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

- 1) bagi mahasiswa, dapat menambah pengetahuan dan menjadi pendorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut;
- 2) bagi pembaca, dapat menambah wawasan mengenai keanekaragaman etnis yang ada di Indonesia, khususnya Etnis Tionghoa yang ada di Makassar;
- 3) bagi ilmu sejarah, dapat memperkaya kajian sejarah lokal, khususnya mengenai kondisi Etnis Tionghoa di Makassar; dan
- 4) bagi almamater Universitas Jember, dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan masalah sosial budaya masyarakat.
- 5) bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini mengemukakan tentang para ahli dan penelitian terdahulu, yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas yaitu tentang aspek-aspek budaya maupun aspek sosial, ekonomi politik yang menyangkut tentang kehidupan orang-orang Tionghoa yang berada di Makassar.

Memecahkan masalah perlu adanya landasan pemikiran terhadap konsep atau teori. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sosiologi. Dilihat dari segi pendekatan sosiologi menurut Kuswanto ada dua ciri khas, yaitu bersifat komparatif dan bersifat holistik. Pendekatan komparatif, yaitu pendekatan yang melihat manusia dengan pandangan yang luas, tidak hanya masyarakat yang terisolasi atau hanya dalam tradisi sosial tertentu saja. Selanjutnya untuk Pendekatan holistik, yaitu suatu pendekatan berdasarkan pendapat bahwa masyarakat itu dapat diselidiki sebagai keseluruhan, sebagai unit-unit yang bersifat fungsional, atau sebagai sistem-sistem tertentu. Sosiologi mencoba mencakup keseluruhan ruang lingkup dari segala sesuatu yang berhubungan dengan kemanusiaan sampai kepada generalisasi-generalisasi. Pendekatan sosiologi dalam ilmu sejarah menghasilkan sejarah sosial. Bidang garapannya pun sangat luas dan beraneka ragam. Kebanyakan sejarah sosial berkaitan erat dengan sejarah sosial-ekonomi. Demikian pula proses transformasi sosial dengan berkembangnya pembagian kerja sosial yang kian rumit dan diferensiasi sosial yang menjadi sangat bervariasi dan terbentuknya aneka ragam institusi sosial juga tidak pernah luput dari pengamatan sejarahwan sosial. Tema-tema seperti : kemiskinan, perbanditan, kekerasan dan, kriminalitas dapat menjadi bahan tulisan sejarah sosial. Di pihak lain seperti kesalehan, kekesatriaian, pertumbuhan penduduk, migrasi, urbanisasi, transportasi, kesejahteraan, dan lain-lain telah banyak dikaji dan semakin menarik minat para peneliti sejarah (Kuntowijoyo, 1993 : 42-43).

Mengkaji dinamika sosial-ekonomi etnis Tionghoa di Makassar menggunakan teori pergerakan sosial menurut Smelser (1962). Pada awalnya

gerakan sosial ini ditandai dengan tindakan *amorfa* yakni suatu tindakan yang digambarkan hampir tidak terorganisasi (tanpa bentuk atau struktur), serta dicirikan oleh tindakan kolektif yang spontan. Oleh sebab itu, gerakan sosial merupakan studi *collective behavior*. Asumsi manusia atau individu pada dasarnya memiliki tindakan yang bertopang pada norma budaya serta terdapat kontrak sosial yang terpola dalam lingkungannya. Sehingga manusia atau individu tersebut menjalankan perannya di dalam kelompok yang terorganisir serta terstruktur. Tetapi terdapat situasi tertentu yang mampu membuat manusia keluar serta menyimpang dari norma lingkungan yang membentuk dirinya. Situasi gejala sosial tersebut digambarkan ketika ada sejumlah individu bertindak di luar kontrol sosial yakni tindakan kolektif seperti kerumunan, *mobs*, panik, protes, dan lain sebagainya. Indikasi awal untuk menangkap gejala sosial tersebut adalah dengan mengenali terjadinya perubahan-perubahan pada semua elemen arena publik. Gejolak sosial yang dinamakan oleh Smelser (1963) sebagai *collective behavior* ini didasari atas adanya dasar keyakinan. Kemudian ia menambahkan bahwasannya komponen pokok aksi sosial adalah: nilai-nilai, norma-norma, mobilisasi motivasi perseorangan untuk aksi yang teratur dalam peran-peran kolektivitas, dan fasilitas situasional atau informasi, ketrampilan, alat-alat dan rintangan dalam mencapai tujuan-tujuan yang konkrit. Setiap gejolak sosial, diarahkan pada komponen-komponen tertentu aksi sosial itu, yakni ditujukan agar dapat merubah nilai-nilai, norma-norma, peranan-peranan, dan fasilitas-fasilitas.

Secara gradual penulis mampu menyimpulkan bahwa pada dasarnya gerakan sosial itu ada karena situasi kondisi yang memberikan kesempatan bagi kemunculan gerakan tersebut, yang secara mayoritas diakibatkan oleh sistem pemerintahan yang cenderung melakukan kesewenang-wenangan terhadap masyarakat, maupun menyelewengkan keadilan sosial. Hal tersebut yang membuat sekelompok rakyat secara sadar terlibat dan melakukan suatu pergerakan yang mempunyai tujuan dasar yang sama yakni menuntut adanya suatu perubahan atau perbaikan sistem bukan untuk merebut kekuasaan.



Terdapat beberapa penyebab terjadinya perilaku kolektif. Menurut Smelser, dalam meneliti faktor penyebab perilaku kolektif harus menggabungkan beberapa elemen penting dalam perilaku untuk dirangkai menjadi sebuah tahapan yang akan menjadi sebuah analisa akhir dalam pola tertentu. Setiap tahapan dan tahapan berikutnya akan terus meningkat dan saling berkaitan membentuk suatu jaringan yang sempurna dalam melihat sebuah fenomena. Smelser memetakan enam faktor yang menjadi penyebab perilaku kolektif (Smelser, 1965 : 15-17) , yaitu :

- 1). *Structural Conduciveness* yaitu adanya suatu struktur sosial yang mendukung lahirnya suatu gerakan.
- 2). *Structural Strain* yaitu adanya ketegangan struktural seperti adanya ancaman tertentu dan privasi ekonomi.
- 3). *The Spread of Generalized belief*, Tersebarannya keyakinan umum yang dianut, ini berarti situasi harus dibuat bermakna bagi perlau potensial, sumber ketegangan dan cara menghadapinya harus diidentifikasi.
- 4). *The precipitating*, yaitu adanya faktor pencetus berupa peristiwa atau situasi tertentu.
- 5) *Mobilization into action* yaitu mobilisasi untu bertindak dalam situasi ini peran seseorang sangat menentukan situasi bisa berkembang menjadi kepanikan, permusuhan, bahkan revolusi.
- 6) *The operation of social control* yaitu pengoperasian kontrol sosial atau faktor penentu yang bisa mencegah, mengganggu, atau menghalangi gejala-gejala itu (Smelser dalam Jurdi, 2010 : 143).

Berdasarkan pendekatan Sosiologi dan teori gerak sosial yang digunakan dalam penelitian ini dirasa cukup tepat untuk digunakan dalam mengungkapkan permasalahan yang ada.

Wirawan Yerry (2013) mengemukakan tentang kedatangan orang-orang Tionghoa pada abad ke 17 hingga 20. Para imigran dari Tionghoa ini datang ke Makassar dikarenakan telah dibukanya pelabuhan di Makassar yang strategis dan menguntungkan. Etnis Tionghoa memulai kedatangannya sebagai seorang pedagang, dikarenakan di kampung halaman masyarakat Tionghoa yaitu

Tiongkok dirasa kurang subur karena terjadinya pembekuan es di musim dingin dan ketika es mulai mencair akan terjadi banjir serta air bahsehingga etnis Tionghoa memasok kebutuhan dari Indonesia yang terkenal memiliki sumber daya alam yang tinggi.

Karya Wirawan yerry ini memberikan gambaran bagi penulis secara luas dalam perkembangan etnis Tionghoa dalam kurun waktu yang cukup panjang. Konsep yang digunakan dalam penulisan Wirawan ini dimulai sejak awal kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia. Kedatangan etnis Tionghoa yang di perbincangkan ini dilihat dari berbagai daerah yang tidak mengkhususkan satu daerah saja. Akan tetapi penulis disini menggunakan ruang lingkup yang berbeda yaitu hanya pada satu daerah saja, yaitu Makassar.

Hari Poerwanto (2014) mengemukakan akan kedatangan Etnis Tionghoa ke Indonesia yang telah menjadi Tionghoa peranakan tetap diakui tentang keaslian orang Tionghoa, walaupun telah meninggalkan identitas aslinya. Pada buku ini dijelaskan pula pandangan pribumi yang menganggap Tionghoa keturunan menggunakan status WNI hanya untuk mencari keuntungan disektor perdagangan. Hal ini didukung pula dengan pandangan etnis Tionghoa yang memandang Pribumi sebagai penduduk yang tingkatannya lebih rendah dibandingkan dengan etnis Tionghoa. Pemikiran ini sebenarnya didasari oleh sifat yang dimiliki oleh Etnis Tionghoa yang memiliki sifat ulet dalam bekerja dan nilai-nilai ekonomi yang diajarkan oleh para leluhurnya dipegang teguh hingga saat ini, hal itulah yang membuat perekonomian Etnis Tionghoa semakin membaik.

Karya Hari Poerwanto ini memberikan suatu gambaran bagi penulis tentang keberadaan etnis Tionghoa di masa sekarang. Etnis Tionghoa di masa sekarang telah menjadi etnis Tionghoa keturunan, namun etnis Tionghoa beranggapan bahwa strata lebih tinggi dari pada pribumi. Penulis memperoleh gambaran tentang pola pikir etnis Tionghoa pada saat awal kedatangan hingga pada masa sekarang. Pandangan mengenai status sosial yang ada di Makassar pada saat Orde Baru dapat dilihat bahwa kebanyakan di pimpin oleh Etnis keturunan Tionghoa, selanjutnya pribumi yang memiliki kedudukan cukup tinggi pula berada pada strata kedua, begitu pula seterusnya sampai ketahap pribumi.

Hidayat Z.M (1993) mengemukakan tentang kebudayaan-kebudayaan Tionghoa yang masih sering digunakan oleh orang-orang Tionghoa di Indonesia yakni mengenai hubungan yang sangat erat antara kehidupan orang Tionghoa di Indonesia dengan tradisi-tradisi dan kepercayaan dan negeri leluhur di Tionghoa. Tradisi dapat dijelaskan bahwa dasar berfikir, pandangan hidup dan sistem kepercayaan orang-orang Tionghoa. Pemikiran-pemikiran orang Tionghoa ini atas asal usul mereka maka mereka menginginkan kehidupan yang lebih baik di tempat perantauannya yaitu Indonesia.

Karya Hidayat Z.M memberikan suatu gambaran mengenai kepribadian dan kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia. Kehidupan etnis Tionghoa dianggap tidak lepas dengan peninggalan para leluhurnya walaupun ada sebagian yang telah di asimilasikan sesuai daerah yang dihuni. Penelitian yang penulis laksanakan disini mengambil fokus yang relatif sama, namun tempat penelitiannya yang terbilang berbeda, yaitu Makassar. Mengenai tradisi-tradisi yang dianut oleh Etnis Tionghoa diantaranya rupan kuda di pay tersendiri/khusus (Kwan Kong), sembahyang kepada Shen/Shien dengan mempersembahkan daging-dagingan (sembahyang sam ceng), sembahyang dengan menggunakan lilin berukuran besar, dianggap bisa mendapatkan rejeki yang besar juga, sembahyang dengan menggunakan hio yang panjangnya lebih dari 1 meter, dengan diameter sekitar 10-15 cm, atau sembahyang dengan dupa satu pak (dupa ratusan) tujuannya agar bisa mendapatkan rejeki yang banyak., sebelum bersembahyang terlebih dahulu mengetuk2 Hiolo/Altar/menghentak2an kaki ke bumi, membakar segepok kertas Kim Coa setelah selesai bersembahyang, dianggap sebagai salah satu bentuk persembahan, mengasapi muka/wajah dengan asap dupa, sembahyang Rebutan atau "Raja Setan" atau "Hantu Kelaparan" (wawancara tanggal 10)

Wibowo (2004) menuliskan tentang etnis orang Tionghoa yang ada diperantauan mengalami pilihan yang penting dalam perkembangannya. Pilihan yang dimaksudkan disini adalah pilihan sejarah. Sejarah yang dimaksudkan adalah sejarah tentang orientasi seseorang. Begitu orang memilih pilihan sejarahnya maka seseorang tersebut harus bertanggung jawab akan pilihannya itu. Wibowo menjelaskan bahwa ada berbagai pilihan yang dapat diambil oleh etnis

Tionghoa . Pertama, etnis Tionghoa berhak memilih sejarah negara asalnya, yaitu sejarah Tiongkok. Pilihan ini maka orang tersebut menjatuhkan dirinya terhadap pilihan yang menitik beratkan orang tersebut untuk menjadi salah satu bagian daratan Tiongkok. Hal itu lain lagi jika seseorang itu memilih sejarah lokalnya (sejarah Indonesia) adalah Indonesia dengan segala ketentuannya.

Karya Wibowo ini memberikan sebuah gambaran mengenai awal kedatangan di Indonesia, dimana dihadapkan dengan persoalan mengenai kehidupan di masa mendatang. Pada karya tersebut memberikan penulis sebuah pengetahuan yang nantinya dapat digunakan dalam penelitiannya, yaitu keuntungan yang diberikan oleh daerah rantauannya terhadap etnis Tionghoa. Pada akhirnya memberikan pengaruh terhadap keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia. Penulis memberikan fokus kajiannya mengenai etnis Tionghoa yang berada di Makassar.

Rizal Bachrun (2003) mengungkapkan bahwa dalam diri orang Tionghoa di Indonesia terdapat sebuah dilema psikologis. Di lain pihak etnis Tionghoa mencintai tanah air Indonesia, tetapi di lain pihak etnis Tionghoa merasa ditolak. Munculnya perasaan kuat yang mendukung untuk tinggal di Indonesia dan ada perasaan yang ingin mempertahankan keaslian etnisnya. Akhir dari delima ini etnis Tionghoa harus memilih untuk tinggal dan menetap di Indonesia dengan segala ketentuannya atau meninggalkan Indonesia untuk kembali ke kampung halamannya yaitu Tiongkok. Ketidakpastian seperti ini dirasakan cukup sulit untuk dipilih karena menyangkut generasi berikutnya.

Karya Rizal Bachrun memiliki persamaan dengan apa yang akan ditulis oleh penulis, dimana sama-sama menggunakan etnis Tionghoa sebagai objek penelitian yang akan diteliti dan sama-sama melihat dilema yang dialami etnis Tionghoa pada saat menentukan kelangsungan hidup di tempat perantauan. Sedangkan perbedaannya karya Rizal Bachrun menggunakan Indonesia sebagai fokus spasial sedangkan penulis menggunakan Makassar. Penulis mengkhususkan daerah Makassar dikarenakan etnis Tionghoa menurut sumber yang penulis dapatkan memberikan keuntungan yang relatif besar terhadap kemajuan perekonomian Makassar.

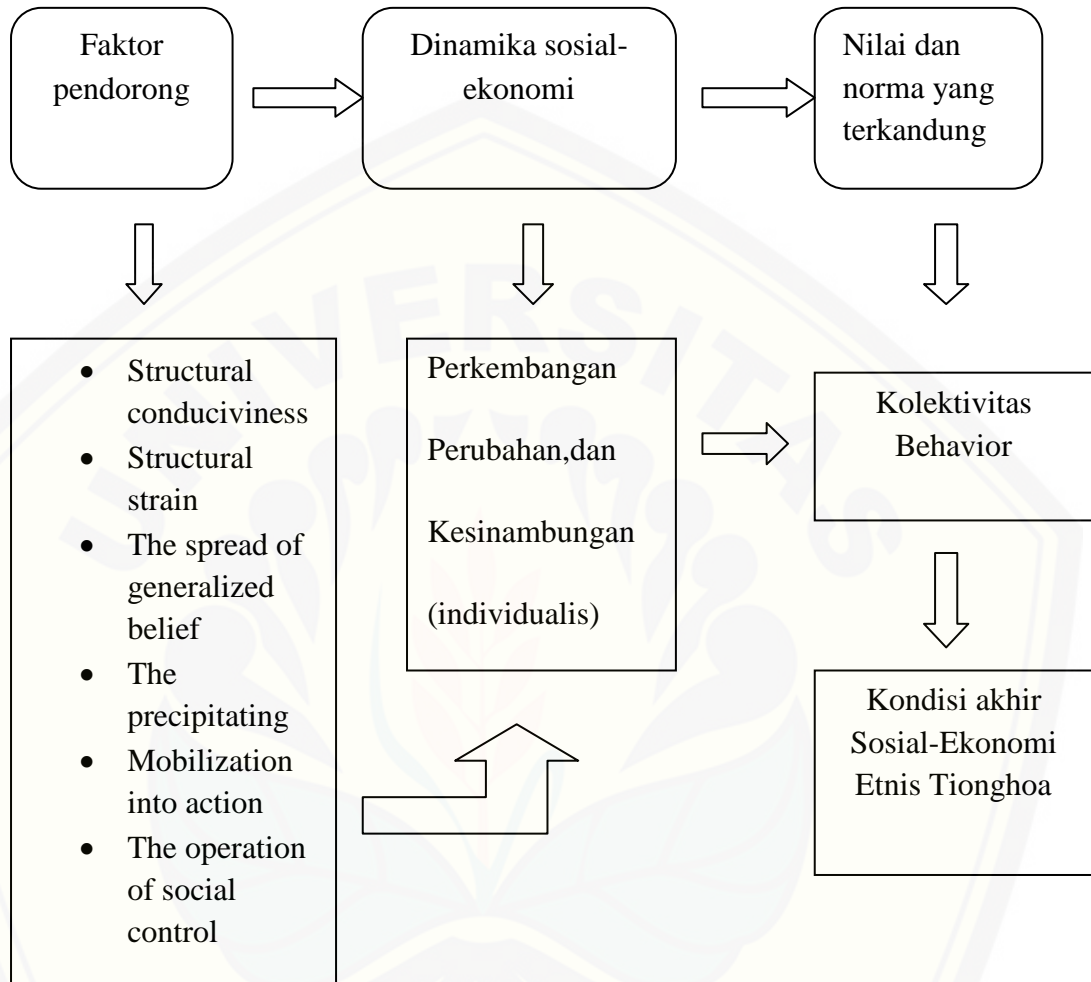
Handoko (1996) mencoba menelusuri betapa nilai-nilai tradisi ternyata sanggup dipakai untuk mendapatkan keunggulan bisnis. Ajaran seperti hokie, hong sui, dan hopeng yang sesungguhnya hendak menghindari dari nasib buruk justru bisa direkayasa sedemikian rupa untuk keuntungan (ekonomis). Nilai-nilai yang dipegang teguh oleh etnis Tionghoa membulatkan tekad mereka untuk berhasil di tempat perantauan dibandingkan kehidupan sebelumnya. Segala usaha dimulai untuk mendapatkan hasil yang memuaskan untuk kelangsungan hidup.

Karya Handoko memberikan gambaran mengenai usaha-usaha yang dilakukan etnis Tionghoa dalam memberikan kemajuan ekonomi. Kemajuan yang diperoleh pada oleh etnis Tionghoa di imbangi dengan sumber daya alam yang memadai. Hal ini sesuai yang dimiliki Indonesia, sehingga perkembangan ekonomi etnis Tionghoa semakin pesat saat berada di Indonesia. Penulis mendapatkan gambaran mengenai pola perdagangan yang digunakan etnis Tionghoa untuk meningkatkan perekonomian.

Edward Lamberthus (2002) menguraikan tentang keadaan maritim di Indonesia yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan ini dimulai dengan dibukanya pelabuhan yang cukup terkenal di Asia yang berada di Makassar. Pola perdagangan yang berada di pelabuhan Makassar pada abad ke-19 mengalami banyak persaingan diantara negara negara Eropa yang mencari bahan baku dan juga mengalami pertarungan terhadap pandangan pandangan berdagang sendiri atau memonopoli perdagangan bebas. Pada buku ini mengupas habis bagaimana kerasnya maritim yang ada di Indonesia tepatnya di Makassar. keadaan maritim yang berhasil bertahan dalam persaingan yang ketat ini membuat pelabuhan Makassar semakin berkembang dan semakin terkenal dikalangan penjelajah lautan pada saat itu.

Karya Edward Lamberthus menggambarkan keberadaan maritim di Makassar. Penulis ingin lebih mengetahui mengenai awal keberadaan etnis Tionghoa ke Makassar dengan adanya pelabuhan pada saat itu. Pada karya Edward, penulis mendapatkan pengetahuan yang luas mengenai maritim yang ada di Makassar yang nantinya penulis gunakan sebagai bahan dari penelitian yang akan diteliti.

Kerangka konseptual atau konsep berfikir peneliti sesuai teori Smelser, yaitu:



### BAB 3. METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian memerlukan data yang valid dan relevan. Usaha untuk memperoleh data yang valid dan relevan dapat diperoleh dengan menggunakan metode. Metode berasal dari bahasa Yunani yakni Methodos yang berarti cara atau jalan, berkaitan dengan upaya ilmiah, metode diartikan dengan upaya kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Koentjaraningrat,1993:7). Metode juga diartikan sebagai suatu cara yang ditempuh seseorang untuk memperoleh pengetahuan (how to know) (Kartodirdjo,1992:ix). Pengetahuan yang didapat akan digunakan dalam pemecahan permasalahan penelitian. Metode memiliki keterkaitan dengan suatu proses, prosedur atau teknik yang sistematis dalam mendapatkan obyek atau bahan-bahan yang diteliti (Sjamsuddin,1994:2).

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah. Menurut Louis Gotschalk (1986:32-34), metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu untuk menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya berdasarkan rekonstruksi sejarah yang imajinatif. Adapun prosedur penelitian sejarah ada empat langkah, yaitu; heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Langkah awal dalam metode sejarah adalah heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani yakni berasal dari kata Heuriskein yang berarti to find. To find tidak hanya berarti menemukan tetapi mencari untuk menemukan. Secara singkat heuristik berarti proses untuk mencari sumber (Notosusanto,1984:11). Sumber-sumber yang didapat bisa berupa bahan-bahan tertulis maupun jejak-jejak yang tidak tertulis yang berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini merupakan penelitian kesejarahan maka peneliti memiliki langkah awal yaitu berusaha mencari sumber-sumber yang berada dilapangan terlebih dahulu seperti observasi lapangan, wawancara, dan analisis peninggalan yang masih ada. Langkah kedua mencari sumber di perpustakaan yang berada di sekitar lapangan penelitian dan di perpustakaan yang dianggap memiliki koleksi buku

yang menunjang peneliti dalam memperoleh pengetahuan lebih lanjut, misalnya buku-buku dan jurnal yang memuat permasalahan yang diteliti. Peneliti melakukan pencarian data di perpustakaan Universitas Jember, perpustakaan umum Makassar dan beberapa koleksi pribadi.

Sumber primer yang diperoleh dalam penelitian ini didapat dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Koentjaraningrat (1997:108-239) wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan kebenaran secara lisan dan bertatap muka. Teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dari informan. Dalam kegiatan ini yang dilakukan adalah wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang mengetahui bagaimana dinamika sosial-ekonomi etnis Tionghoa di Makassar pada tahun 1966-1998. Pada sumber primer ini penulis mencari narasumber yang dirasa memahami betul terhadap situasi yang terjadi di Makassar pada masa Orde Baru. Kriteria yang dipakai dalam pencarian narasumber tersebut adalah Etnis Tionghoa yang mendiami Makassar pada tahun 1966-1998, sehat, tidak pikun, penjelasannya masih sesuai, dan salah satu narasumber tersebut adalah Tang (mantan aktivis), Che (penjaga klenteng), Ko Fanny (pengurus klenteng Si Naga Sakti Xiang Ma, Tong Hong Siek (kepala klenteng Kwan Kong), Tong Hong Pue (pemimpin doa), Ing (umat), Robet (pemilik toko). Selanjutnya dalam usaha menganalisis hasil yang diperoleh harus diadakan perbandingan dan analisis dengan menggunakan sumber buku yang diperoleh oleh peneliti. Menurut Kartodirdjo (1993:16) dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui sumber tertulis berupa arsip-arsip, buku-buku tentang teori, dalil dan pendapat yang berhubungan dengan penelitian.

Mengenai sumber yang diperoleh dari wawancara, penulis memiliki beberapa aspek yang dipertanyakan dalam proses pencarian sumber melalui wawancara terhadap masyarakat yang terkait, yaitu: 1) bagaimana kehidupan sosial-ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar menjelang masa Orde Baru; 2) bagaimana perkembangan, perubahan, dan kesinambungan kehidupan sosial-ekonomi etnis Tionghoa di Makassar pada masa Orde Baru (1966-1998); dan 3) nilai dan norma apa yang terkandung pada sosial-ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar pada masa Orde Baru (1966-1998)



Sumber sekunder diperoleh dari studi kepustakaan mengenai penelitian yang relevan. Peneliti mencari sumber sekunder di perpustakaan umum yang ada di Makassar, hal ini dikarenakan akan lebih mudah dengan mencari sumber yang diinginkan bila penulis terjun langsung ke lapangan. Mengenai sumber yang berasal dari buku, kepustakaan anatara lain *Sejarah Masyarakat Tionghoa Makasar dari Abad Ke-17 Hingga Ke-20*, dan *Makasar Abad XIX* (2002) karya Edward L. Pada buku tersebut mengenai abad ke-20 telah terkandung secara luas mengenai keadaan Etnis Tionghoa. *Sejarah Masyarakat Tionghoa Makasar dari Abad Ke-17 Hingga Ke-20* (2013) ditulis oleh Yerry Wirawan, buku ini menceritakan mengenai kondisi yang berada di Makassar pada masa Orde Baru. Hal inilah yang membuat buku ini menjadi sumber buku yang relevan. *Dilema Minoritas Tionghoa* (1984) karya Dr. Leo Suryadinata, buku ini telah menunjukkan perasaan Etnis Tionghoa yang terjadi pada masa transisi masa, oleh karena itu buku ini mampu menjadi sumber sekunder. dan *Makasar Abad XIX* (2002) karya Edward L, lebih menceritakan tentang kedatangan awal Etnis Tionghoa pada kala itu sehingga masih termasuk dan relevan untuk digunakan sebagai sumber informasi.

Sehubungan dengan sifat penelitian yang berupa studi literatur, maka langkah pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui sumber tertulis berupa arsip-arsip, buku-buku tentang teori, dalil dan pendapat yang berhubungan dengan penelitian. Untuk karya tertulisnya bisa ditemukan di berbagai perpustakaan; seperti Perpustakaan Pusat Universitas Jember, Perpustakaan Kelamas, Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Jember, Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Malang dan toko-toko buku lainnya.

Langkah kedua dari metode sejarah adalah kritik. Setelah pengumpulan sumber-sumber baik dari sumber tertulis maupun sumber lisan diadakan kritik yaitu dengan menyeleksi terhadap sumber-sumber sejarah yang diperoleh, sehingga menghasilkan fakta-fakta sejarah, yang dapat diyakini keasliannya dan dapat dipercaya (Gottshalk, 1986:100). Tujuan diadakan kritik ini untuk mengetahui kebenaran isi, keaslian dan keutuhan dari masing-masing sumber.

Kritik disini dibagi dua yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kritik ekstern terlebih dahulu. Penerapan kritik ekstern melalui kegiatan meneliti keaslian sumber untuk memutuskan sumber tersebut merupakan sumber yang benar asli. Sedangkan kritik intern mulai bekerja setelah kritik ekstern selesai untuk menentukan bahwa sumber yang didapat merupakan sumber yang dibutuhkan (Notosusanto:1971:21). Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam melakukan kritik adalah menetapkan kebenaran dari sumber yang diuji untuk mengkasilkan fakta sejarah.

Berdasarkan sumber yang telah ditemukan tadi, maka penulis melakukan kritik terhadap sumber-sumber tersebut. Pada buku *Sejarah Masyarakat Tionghoa Makasar dari Abad Ke-17 Hingga Ke-20* ini bisa ditemukan bahwa masa kedatangan pertama Etnis Tionghoa dimulai pada abad ke 17 dengan melakukan perdagangan. Keakuratan mengenai sumber buku ini sudah cukup relevan bagi penulis dikarenakan telah memberikan bukti-bukti dokumentasi dan arsip-arsip yang keasliannya sudah terpercaya. Buku kedua yaitu, *Makasar Abad XIX* (2002) karya Edward L menceritakan tentang bagaimana cara kedatangan awal Etnis Tionghoa ke Indonesia dan mengenai kendala lapangan yang terjadi pada awal kedatangan. Bagi penulis buku ini membantu untuk mengetahui kondisi awal yang terjadi pada masa perdagangan yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa dan juga membantu sistem sistem apa saja yang dilakukan untuk memajukan sistem ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar pada masa itu. Namun mengenai pembaruan buku ini dirasa perlu dikarenakan pada buku ini masih menggunakan bahan yang mudah rapuh dalam penulisannya. Buku ketiga yaitu, *Sejarah Masyarakat Tionghoa Makasar dari Abad Ke-17 Hingga Ke-20* (2013) ditulis oleh Yerry Wirawan telah menceritakan mengenai keadaan masyarakat Etnis Tionghoa dari awal kedatangan hingga sekarang. Hal itu telah dibuktikan dengan menganalisis tahun ke tahun yang membuat Etnis Tionghoa mengalami perubahan,perkembangan atak kesinambungan dengan masyarakat sekitarnya. Bagi penulis sendiri buku ini telah cukup membantu karena telah menggambarkan hal apa saja yang telah terjadi di Makassar. Buku keempat yaitu, *Dilema Minoritas Tionghoa* (1984) karya Dr. Leo Suryadinata, dan *Makasar Abad XIX*

(2002) karya Edward L berisikan mengenai keinginan Etnis Tionghoa yang dijabarkan dengan sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa untuk mencapai sebuah keinginan yang dikehendaki. Penulis Dr. Leo Suryadinata ini memiliki pemikiran-pemikiran yang umum sehingga mudah untuk mengetahui dari keinginan dari kedua belah pihak. Dan bagi peneliti sendiri buku ini telah mampu menghadirkan perasaan yang dirasakan Etnis Tionghoa pada masa itu.

Penulis dalam penelitian ini untuk mengetahui kebenarannya yaitu dengan cara membandingkan kesaksian dari hasil wawancara, benda peninggalan yang ditinggalkan pada zaman yang berkaitan dan dokumen yang merupakan sumber sekunder tetapi diharapkan masih dapat mencari kedekatan. Perbandingan ini bertujuan untuk memperoleh data yang relevan.

Langkah ketiga berikutnya adalah interpretasi yaitu penafsiran atas sumber-sumber yang terpilih dan menyatukan fakta-fakta yang sudah diperoleh yang nantinya bermanfaat untuk historiografi. Dalam hal ini penulis setelah memperoleh fakta-fakta yang dibutuhkan mengenai dinamika sosial-ekonomi etnis Tionghoa di Makassar pada tahun 1966-1998. Bagi penulis fakta-fakta yang diperoleh harus telah mengalami perbandingan antara sumber yang tertulis dari buku dan juga sumber yang diperoleh dari wawancara lapangan yaitu di Makassar, bila telah mendapatkan kepastiannya maka dianggap sebagai fakta-fakta yang memang benar, jadi bisa diyakini dan dibuktikan kemudian penulis berusaha melakukan analisis yang berkaitan dengan penyatuan sumber yang dirangkaikan secara kronologis berdasarkan pada aspek pembahasan. Interpretasi dilakukan berdasarkan fakta yang diperoleh dari kritik yang masih terpisah dan berdiri sendiri. Oleh karena itu fakta yang masih terlepas dan berdiri sendiri harus diinterpretasikan dengan cara menghubungkan sehingga menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal (Notosusanto,1971:41).

Langkah terakhir dalam metodologi sejarah adalah historiografi. Historiografi adalah tahapan merangkaikan fakta-fakta yang ada menjadi suatu kesatuan yang logis, sehingga menghasilkan cerita sejarah. Hal ini sesuai dengan pendapat Notosusanto (1971:24) yang menyatakan historiografi adalah klimak dari penelitian sejarah dan merupakan bagian dari metode sejarah yaitu

menuliskan hasil interpretasi atas fakta-fakta sejarah yang telah disusun secara analitis, kronologis dan sistematis. Penulis harus memiliki sifat kreativitas dalam merangkai kata kata sesuai dengan alur cerita yang sebenarnya. Selain itu penulis diharuskan memiliki sifat yang objektif terhadap suatu peristiwa sehingga kebenaran cerita tersebut bisa dibuktikan. Selanjutnya cerita tersebut berbentuk cerita sejarah yang menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan tata tulis bahasa baku bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Penyajian dari penelitian ini adalah penyusunan karya atau kisah sejarah dalam bentuk karya tulis ilmiah.

Pada langkah terakhir ini penulis berusaha mengungkapkan pemikirannya dalam memperoleh fakta-fakta yang didapat didalam penelitiannya agar terbukti kebenarannya. Peneliti pada awalnya akan mencari untuk menemukan sumber-sumber tersebut di berbagai tempat dan melihat pula kesemua aspek yang dirasa bersangkutan dengan apa yang peneliti kerjakan. Pencarian ini diperoleh dari hasil observasi,wawancara, dan analisis benda peninggalan. Selanjutnya dari hasil pencarian tersebut penulis mengklarifikasi apakah sumber yang diperoleh itu relevan. Cara penulis mencari kerelevanannya suatu sumber tersebut yaitu membandingkan hasil wawancara,observasi,dan analisis dengan buku yang dirasa menunjang atau bersangkutan. Fakta yang berhasil terkumpul sesuai dengan kriteria tersebut bisa disatukan menjadi sebuah pernyataan yang dapat dipahami.

Bab 1 Pendahuluan pada penelitian ini memaparkan 1.1 latar belakang penelitian: berupa pernyataan terkait tentang pentingnya penelitian ini dilakukan, 1.2 penegasan pengertian judul:berupa penjelasan mengenai makna yang terkandung di dalam judul penelitian ini yaitu “Dinamika Sosial-Ekonomi Etnis Tionghoa Di Makassar Pada Masa Orde Baru (1966-1998)”, 1.3 ruang lingkup penelitian:dibagi menjadi dua yaitu skup temporal (waktu) dan skup spesial (tempat), 1.4 rumusan permasalahan: berupa permasalahan yang disusun secara sistematis dilihat dari latar belakang masalah yang ada, 1.5 tujuan penelitian dan 1.6 manfaat penelitian. Bab 2 Tinjauan Pustaka pada penelitian ini penulis memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para ahli yang terkait dengan Dinamika Sosial-Ekonomi Etnis Tionghoa Di Makassar Pada Masa Orde Baru (1966-1998) dan teori-teori serta pendekatan yang digunakan pada

penelitian ini. Bab 3 metode penelitian pada penelitian ini memaparkan tata cara memperoleh data, menganalisis data dan merenkontruksi fakta-fakta sejarah sesuai dengan kaidah-kaidah atau aturan penulisan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penelitian sejarah yang didalamnya terdapat empat tahap yaitu, heuristik (pencaean dan pengumpulan data), (analisis), interpretasi ( penafsiran) dan historiografi (penyajian).

Deskripsi hasil penelitian di uraikan pada bab 4, bab 5, dan bab 6. Pada bab 4. Memaparkan kondisi sosial-ekonomi etnis Tionghoa di Makassar menjelang Orde Baru. Pada bab 5. memaparkan perkembangan,perubahan, dan kesinambungan kondisi sosial-ekonomi etnik Tioghoa di Makassar pada masa Orde ( 1968-1998). Pada bab 6. memaparkan nilai dan norma yang terkandung pada sosial-ekonomi etnis Tionghoa di Makassar pada masa Orde Baru ( 1968-1998). 7.mendeskripsikan simpulan dan saran dari penelitian ini.

## **BAB 4. KEHIDUPAN SOSIAL-EKONOMI ETNIS TIONGHOA DI MAKASSAR MENJELANG MASA ORDE BARU**

Kebijakan Sosial-Ekonomi rezim Orde Lama, terutama yang berkaitan dengan Etnis Tionghoa adalah pertama, pada pemerintahan Soekarno sebelum tahun 1950 membuat kebijakan positif untuk orang Tionghoa dalam hal status kewarganegaraannya yaitu dengan *jus soli* atau *Sistem Pasif* yang menyatakan bahwa warganegara Indonesia adalah orang asli (semua orang) yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan adanya kebijakan tersebut, secara otomatis masyarakat Tionghoa di Indonesia menjadi warganegara Indonesia walaupun tetap pasif dalam arti anti melakukan apapun untuk mereaksi adanya undang-undang tersebut (Vinia, 2005 :14). Kedua, pada tahun 1954 pemerintah mulai mengganti kebijakan kewarganegaraan yang lebih mengikat dengan menerapkan azas *jus soli dua generasi* (pengganti *jus soli* sebelumnya di tahun 1950) dimana sistem ini mensyaratkan adanya pernyataan penerimaan kewarganegaraan Indonesia. Dimana dalam sistem ini nantinya warga Tionghoa keturunan Indonesia akan kehilangan kewarganegaraan jika tidak bias menunjukkan atau memenuhi salah satu persyaratan yang ada. Ketiga, Pada 14 Mei 1959 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 10 Tahun 1959 yang isinya menetapkan bahwa semua usaha dagang kecil milik orang asing di tingkat desa tidak diberi izin lagi setelah 31 desember 1959.

### **4.1 Kehidupan Sosial Etnis Tionghoa**

Berawal dari kebijakan-kebijakan yang telah dicetuskan pada masa Orde Lama tersebut membuat Etnis Tionghoa mengalami beberapa kendala dalam gerak hidupnya. Hal ini dikarenakan peraturan yang berubah-ubah untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya. Perubahan-perubahan kebijakan tersebut sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek yang berada di dalam keyakinan Etnis Tionghoa pada awalnya. Aspek-aspek yang mengalami perubahan etnis Tionghoa diantaranya:

#### 4.1.1 Interaksi Sosial

Pada kebijakan pertama yang dicetuskan yaitu pada tahun 1950 mengenai *jus soli* atau *Sistem Pasif*, beberapa orang Tionghoa ada juga yang masih memilih menjadi warga negara asing. Menurut Suryadinata, alasan mengapa Etnis Tionghoa lebih memilih menjadi warga negara asing adalah pertama, sebagai warganegara asing, yang dalam hal ini lebih mengarah kepada Warga Negara RRC, secara hukum akan selalu dijaga dan dilindungi oleh pemerintah negara asalnya walaupun sudah berada di luar wilayah negaranya, dan kedua, dipandang dari sudut ekonomi, akan lebih mudah menjalin hubungan dagang dengan penduduk Etnis Tionghoa khususnya bagi yang sering bepergian keluar negeri. (Vinia, 2005:3-4). Jadi bisa dikatakan pada masa kebijakan itu berlangsung sikap dari Etnis Tionghoa masih bersikap acuh terhadap pribumi.

Pada tahun 1954 pemerintah mulai mengganti kebijakan kewarganegaraan yang lebih mengikat dengan menerapkan azas *jus soli dua generasi* (pengganti *jus soli* sebelumnya di tahun 1950) sistem ini mensyaratkan warga Etnis Tionghoa keturunan Indonesia akan kehilangan kewarganegaraan jika tidak bisa menunjukkan atau memenuhi salah satu hal berikut:

1. Memberikan bukti bahwa orang tua mereka telah tinggal di Indonesia selama 10 tahun;
2. Menyatakan secara tidak resmi menolak kewarganegaraan China (Suryadinata,1984:117-118).

Selain itu, terdapat beberapa peraturan tambahan yang dicantum kedalam undang-undang kewarganegaraan pada tahun 1955 dan yang kemudian direvisi pada tahun 1958, yaitu:

- a) harus menaati peraturan perundang-undangan di Indonesia agar menjadi warga negara Indonesia;
- b) Orang Tionghoa kelahiran Indonesia yang orang tuanya berdiam dan lahir di Indonesia boleh mengajukan diri untuk menjadi warga negara Indonesia apabila telah berumur 18 tahun; dan

- c) seseorang yang berumur lebih dari 18 tahun yang orang tuanya tidak lahir di Indonesia orang tersebut harus mengajukan permohonan naturalisasi (Vinia, 2005:3-4).

Kebijakan kedua inilah Etnis Tionghoa mengalami kebingungan dalam memilih kewarganegaraannya. Etnis Tionghoa memulai berinteraksi dengan kaum pribumi untuk lebih mengenal sifat dari pribumi, meskipun ini hanya dilakukan oleh sebagian orang. Adapula yang memulai bertukar fikiran antar sesama perkumpulan Etnis Tionghoa yang berada di Makassar. Dari hasil yang dapat diketahui pada masa itu yaitu masih banyak Etnis Tionghoa yang berada di Makassar, hal ini dikarenakan keuntungan yang diperoleh dari bertempat tinggal di Makassar sungguh menjanjikan dibandingkan harus kembali ke daerah asalnya yaitu Tiongkok (Wawancara dengan Robet, 10 oktober 2015)

Pada tahun setelah dikemukakan kebijakan tersebut Etnis Tionghoa dan pribumi hidup di Makassar secara bersama-sama. Kebanyakan dari masyarakat Makassar ini berpekerjaan sebagai pedagang dan pengusaha. Namun karena Etnis Tionghoa mendapat bantuan dari sanak saudaranya yang berada di tempat asalnya atau yang berada di sekitar Makassar itu sendiri sehingga memudahkan Etnis Tionghoa memonopoli perdagangan yang berada di Makassar. Lambat laun perdagangan yang berada di Makassar ini jauh lebih berkembang dari pada perdagangan yang dijalankan oleh pribumi. Dari situlah muncul sebuah rasa tidak puas akan keberadaan yang seperti ini, bahwa Etnis Tionghoa lebih unggul dan lebih menguasai lapangan pekerjaan di Makassar dari pada rakyat pribumi. Sebenarnya nasib yang didapat dari pribumi ini tidak jauh berbeda dengan masa kolonial di Indonesia. Meskipun begitu ada juga beberapa tokoh Tionghoa yang mendukung perjuangan bangsa Indonesia (Wawancara dengan Robet, 10 oktober 2015)

Pada masa orde lama, Etnis Tionghoa sangat dihargai karena adanya Poros Jakarta-Peking. Namun etnis ini menjadi pelampiasan massa karena peristiwa G30S, sehingga menimbulkan trauma. Secara umum perusahaan Belanda dan pihak swasta asing dominan dalam sektor ekonomi utama, seperti manufaktur, perkebunan, industri tekstil, dan sektor-sektor lainnya. Setelah itu, terjadi



perubahan peran ekonomi etnis Cina, yang sedikit demi sedikit memasuki usaha grosir dan ekspor impor yang waktu itu masih didominasi Belanda, kemudian diikuti juga dengan tumbuhnya bank-bank swasta kecil yang dimiliki oleh Etnis Cina (Mackie, 1991:322-323). Kebencian Pribumi terhadap Etnis Tionghoa mulai muncul, kemunculan ini ditandai dengan sebuah tuntutan kepada pemerintah agar kehidupan masyarakat pribumi tidak terus terusan seperti ini dibawah naungan dari Etnis Tionghoa.

Soekarno yang melihat kelompok pribumi semakin tersisih dalam bidang ekonomi karena dikuasai oleh Etnis Tionghoa pada 14 Mei 1959 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 10 Tahun 1959 yang isinya menetapkan bahwa semua usaha dagang kecil milik orang asing di tingkat desa tidak diberi izin lagi setelah 31 desember 1959. Peraturan ini terutama ditujukan pada pedagang kecil Tionghoa yang merupakan bagian terbesar orang-orang asing yang melakukan usaha di tingkat desa. Alhasil, semakin mengeraslah perlakuan rasis terhadap orang Tionghoa di Indonesia. Bahkan sebagai akibat dari PP Nomor 10 Tahun 1959 itu, selama tahun 1960-1961 tercatat lebih dari 100.000 orang Tionghoa meninggalkan Indonesia dan secara tipikal mengalami banyak kesengsaraan. Di satu pihak karena intrik-intrik politik negara Indonesia dan Tiongkok, dan di lain pihak disebabkan karena meningkatnya teror di perbatasan-perbatasan Indonesia sendiri.

Sebutan orang “Cina” oleh sebagian besar Rakyat Indonesia dan perlakuan aparat militer yang menjadi alat negara telah mampu mendiskreditkan Etnis Tionghoa sebagai kaum pendatang yang harus tunduk pada masyarakat yang punya tanah kelahiran (pribumi). Namun kenyataan menjadi paradoks ketika lobi-lobi penguasa tempo itu tidak bisa terhindar dari sebagian elit Etnis Cina. Rasa dendam terhadap Etnis Cina semakin memberi kekuatan baru bagi perjuangan meminggirkan Etnis Cina. Di sisi yang lain, bangkitnya semangat nasionalisme yang cenderung mengacu pada sentimen primordial adalah faktor lain yang menunjukkan betapa suramnya rasialisme di wajah Negara Republik Indonesia saat itu.

Pasca kemerdekaan, friksi antara Etnis Tionghoa dengan pribumi di Indonesia kembali memuncak ketika pemerintahan Presiden Soekarno (yang didukung oleh PKI) dalam kebijakan luar negerinya berporos ke Peking yang tentunya menguntungkan Etnis Tionghoa, dan ini adalah sikap yang wajar mengingat Tiongkok adalah tanah leluhur Etnis Tionghoa. Kondisi ini pada akhirnya membawa kerugian bagi Etnis Tionghoa ketika peristiwa yang menjadi anti klimaks dari hubungan antara orang-orang Tionghoa dengan pribumi, yaitu meletusnya peristiwa G30S, yang dilanjutkan dengan lengsernya Presiden Soekarno. Sejak saat itu, orang-orang Tionghoa yang berada di Indonesia diisolasi dari kegiatan politik (Tan 1981:22).

#### **4.1.2 Identitas Budaya etnis Tionghoa**

Pada masa Orde Lama setelah diumumkan mengenai kebijakan yang berlaku di Indonesia pada saat itu, maka Etnis Tionghoa yang telah melengkapi persyaratan yang ada berhak bertempat tinggal di Indonesia. Identitas budaya Etnis Tionghoa tetap dijalankan sesuai ketentuan leluhur dengan kebebasan yang penuh. Salah satu identitas budaya Etnis Tionghoa antara lain:

##### **a. Jodoh**

Sama halnya dengan suku bangsa lain yang ada di Indonesia, etnis Tionghoa juga memiliki aturan sendiri dalam hal penentuan jodoh guna meneruskan kehidupannya. Etnis Tionghoa sangat pantang melakukan pernikahan dengan marga yang sama, namun guna menjaga harta keluarga agar kelak tidak jatuh ke tangan orang lain etnis ini mengusahakan adanya pernikahan satu nenek moyang yang berbeda marga. Untuk perkawinan antara pihak laki-laki yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan wanita menjadi sebuah pantangan bilamana pihak laki-laki berasal dari generasi yang lebih muda. Hal ini memiliki filosofi tersendiri, karna di maksudkan bahwa seorang suami haruslah lebih tua dan tinggi derajatnya dari sang istri. Pada masa lalu, saat kerajaan-kerajaan masih banyak berdiri di Indonesia etnis Tionghoa mengadakan ikatan-ikatan terhadap penguasa lokal serta pihak istana. Hal seperti itu dianggap sebagai syarat yang

harus ada pada masa itu, karena hal ini menjadi sangat penting untuk keberhasilan perdagangan di pedalaman.

b. Perkawinan

Pada umumnya pernikahan adalah sebuah bagian metamorfosis kehidupan manusia sebagai final kedewasaan. Seseorang akan memiliki tanggung jawab lain atas kehidupan barunya. Bagi etnis Tionghoa sendiri pernikahan dianggap sebagai tolak ukur kesuksesan seseorang dalam hidupnya. Oleh karena itu Etnis Tionghoa akan membuat pesta pernikahan ini dengan mahal, mewah, sarat tradisi bahkan rumit. Karena siklus ini merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan setiap insan. Upacara pernikahan pada etnis ini tidak seragam di semua tempat, melainkan tergantung pada tempat diadakannya, adat lain, adat setempat, agama, pengetahuan dan pengalaman mereka masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa sebuah pernikahan dalam etnis tionghoa didasarkan kekerabatan, kekeluargaan, kemanusiaan dan sebagai pelindung keluarga.

c. Adat menetap sesudah menikah

Dalam adat Tionghoa, ahli waris akan di teruskan oleh anak laki-laki tertua dalam suatu keluarga dan akan meneruskan pemujaan leluhur yang dilakukan oleh ayahnya. Oleh karena itu pihak wanita yang telah menikah diwajibkan hidup dan tinggal bersama keluarga pihak suami. Pada prinsipnya setiap anak diwajibkan untuk tetap berbakti pada orang tua sebelum maupun setelah menikah. Hal ini akan menjadi gambaran bagi generasi seterusnya dalam berbakti pada orang tua. Namun untuk anak laki-laki selanjutnya diberi kebebasan dalam menentukan tempat tinggalnya sesudah menikah.

d. Kedudukan Wanita

Pada masa lalu para wanita Etnis Tionghoa mengalami diskriminasi gender yang sangat kuat. Adanya perbedaan perlakuan yang diterimanya sangat berbeda dengan pria. Saat para wanita Etnis Tionghoa mulai beranjak dewasa, akan mulai mengalami larangan untuk keluar rumah (di pingit). Dan saat sudah menikah para wanita juga tidak di perkenankan untuk memilih tempat tinggal, melainkan harus tinggal bersama suaminya serta wajib untuk patuh dan tunduk

pada mertuanya. Para wanita juga mendapat larangan untuk mendapat bagian kehidupannya di luar rumah (Lubis, M: 1995,13-27)

#### **4.1.3 Kebebasan berekspresi**

Pada masa Orde Lama setelah diumumkan mengenai kebijakan yang berlaku di Indonesia pada saat itu, maka Etnis Tionghoa yang telah melengkapi persyaratan yang ada berhak bertempat tinggal di Indonesia. Etnis Tionghoa pada saat itu tidak langsung beradaptasi dengan lingkungan setempat, melainkan membuat benteng pemisah antaranya dengan kaum pribumi. Hal ini bisa dilihat pada bahasa,sekolah, dan nama yang berbeda dari kaum pribumi. Kegiatan keagamaan yang dilakukan masih bersifat turun temurun dan murni dari leluhurnya.

Kebebasan yang dirasakan Etnis Tionghoa pada saat itu dirasa cukup lenggang. Hal ini juga bisa dilihat pada lingkungan sekitar Etnis Tionghoa yang pada saat Orde Lama bebas menempelkan iklan atau tulisan dengan bahasa Cina. Vihara atau klenteng bisa ditemukan disetiap sudut kota Makassar. Perayaan untuk hari besar dilakukan dengan sangat meriah dan juga melibatkan seluruh masyarakat pada saat itu.Kepercayaan yang berasal dari Cina seperti Tao, Kong Hu Cu, maupun Konfusianisme bisa dilakukan dengan bebas. Kebebasan inilah yang mengakibatkan kepercayaan tersebut mulai menyebar di kalangan masyarakat setempat (wawancara dengan Che, 10 Oktober 2015).

Kebebasan berekspresi juga tidak luput didalam dunia pemerintahan pada saat itu. Pada Orde Lama, terdapat beberapa menteri Republik Indonesia dari keturunan Tionghoa seperti Oei Tjoe Tat, Ong Eng Die, Siauw Giok Tjhan, dll. Bahkan Oei Tjoe Tat pernah diangkat sebagai salah satu “tangan kanan” Ir. Soekarno pada masa Kabinet Dwikora. Pada masa ini hubungan Ir. Soekarno dengan beberapa tokoh dari kalangan Tionghoa dapat dikatakan sangat baik. Sedangkan pada masa revolusi atau pra-kemerdekaan RI marjinalisasi warga Tionghoa tampak pada berita politik yang dimuat dalam media massa seperti dalam perjuangan fisik ada beberapa pejuang dari kalangan Tionghoa, namun nama tidak banyak dicatat dan diberitakan. Salah seorang yang dikenali ialah

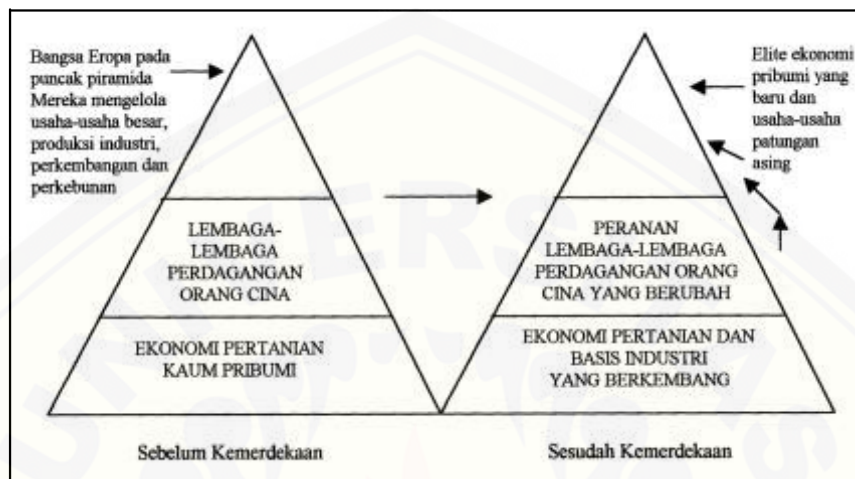
Tony Wen, yaitu orang yang terlibat dalam penurunan bendera Belanda di Hotel Oranye Surabaya (Suryadinata, Leo. 2010: 193)

#### **4.2 Kehidupan Ekonomi Etnis Tionghoa**

Kebebasan berusaha Etnis Tionghoa dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya pada masa Orde Lama dirasa cukup baik. Hal ini dikarenakan kebijakan dan keputusan yang dicetuskan pemerintah cukup lenggang. Perekenomian etnis Tionghoa cepat berkembang dengan bantuan sanak saudara dan juga dengan sifat gigih yang dimiliki. Toko-toko Etnis Tionghoa yang berada di Makassar pada saat itu juga ikut berkembang. Perkembangan yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa di Makassar dengan cara memonopoli perdagangan yang setara kedudukannya dengan kecamatan. Hingga hasilnya bisa menguasai jalan-jalan atau pemukiman warga pribumi untuk membangun sebuah koloni baru yang didiami oleh Etnis Tionghoa. Jalan-jalan yang berhasil dikuasai di Makassar sampai sekarang sebagai pemukiman Etnis Tionghoa adalah jalan Sulawesi, Irian, Nusantara, Lembah, Bali, dan sekitarnya (Wawancara dengan Ing, 14 Oktober 2015)

Sejak tahun 1961, dalam bukunya *Hoa Kiau* di Indonesia, Pramoedya Ananta Toer telah mensinyalir posisi sosio ekonomi ini. Menurut Toer, pengusaha Tionghoa (Istilah Toer dengan *Hoa Kiau*) mendapat kedudukannya bukan dengan serta merta, tetapi melalui perkembangan sosial yang panjang di tengah sejarah masyarakat Indonesia. Pedagang Tiongkok telah mulai berada di Indonesia (Nusantara) sejak awal mula sebelum ada proses perdagangan dengan Tiongkok. Mula-mula sebagai misi-misi kerajaan, misi keagamaan, dan misi-misi lain non perdagangan. Jadi keunggulan jati diri hubungan antara Tiongkok dan Indonesia telah ada. Jati diri ini lahir lebih dahulu daripada jiwa ekonomi perdagangan antara dua bangsa muncul. Ketika masa perdagangan muncul, baik yang tradisional dan modern, maka para pedagang Tiongkok ini mendapatkan tempat di lubuk hati manusia Indonesia berupa ekonomi industri, perdagangan, pertanian, kerajinan, dan sebagainya. Sekaligus pengaruh pada dunia sastra, literatur, kebudayaan daerah berdasarkan eksistensi dan kehidupan para pedagang Tiongkok di tengah-tengah masyarakat besar Indonesia. Terlebih-lebih dengan

kedatangan orang Barat, maka ada posisi lowong, sebagai kelas perantara terbuka lebar bagi pedagang Tiongkok. Marilah disimak hal ini menurut Ch'ng, dibandingkan antara struktur sosial ekonomi sebelum dan sesudah kemerdekaan.



Sumber: Ch'ng, 1995:29

Gambar 1. Struktur Sosial-Ekonomi Bertingkat Tiga Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan

Secara ringkas dapat disimpulkan perubahan struktur yang terjadi sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia, menjadikan perubahan fungsi orang Tionghoa dalam sosial ekonomi, meskipun nilai-nilai positif dan nilai negatif menyertai peranan pengusaha Tionghoa tersebut. Pengaruh positif dan negatif tersebut nampak hingga hari ini dalam fungsi pengusaha Tionghoa di tengah masyarakat besar Indonesia.

## **BAB 5. PERUBAHAN, PERKEMBANGAN, DAN KESINAMBUNGAN KONDISI ETNIS TIONGHOA DI MAKASSAR PADA MASA ORDE BARU (1966-1998)**

Perhatian Pemerintah Indonesia terhadap upaya penyelesaian masalah Tionghoa di Indonesia terus berkembang hingga masa pemerintahan Orde Baru. Perhatian pemerintahan itu diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan di berbagai bidang. Salah satu kebijakan tersebut adalah di bidang sosial budaya. Kebijakan di bidang sosial budaya pada saat itu adalah Instruksi Presiden Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 yang isinya mengenai penghapusan penggolongan-penggolongan penduduk Indonesia berdasarkan pasal 131 dan 163 (golongan Eropa, golongan timur asing/Tionghoa, dan golongan pribumi) pada kantor-kantor catatan sipil di seluruh Indonesia, dan kantor itu terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia. Bersamaan dengan perubahan politik tersebut, rezim Orde Baru melarang segala sesuatu yang berbau Cina. Segala kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina tidak boleh dilakukan lagi. Hal ini dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Di samping itu, masyarakat keturunan Cina dicurigai masih memiliki ikatan yang kuat dengan tanah leluhurnya dan rasa nasionalisme terhadap Negara Indonesia masih diragukan. Akibatnya, keluarlah kebijakan yang sangat diskriminatif terhadap masyarakat keturunan Cina baik dalam bidang politik maupun sosial budaya. Di samping Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tersebut, dikeluarkan juga Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967 tentang Masalah Cina.

### **5.1 Perubahan Sosial-Ekonomi Etnis Tionghoa**

Perubahan adalah suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dari cara-cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi, perubahan terjadi sesuai dengan perkembangan masyarakat pendukungnya. Tidak ada dukungan dari masyarakat, maka tidak akan ada perubahan, baik itu ke arah positif atau negatif

Sejak dikeluarkan Instruksi Presiden Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 kewarganegaraan hanya dibedakan menjadi dua yaitu, Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Keadaan ini berubah dari masa Orde Lama yang disebutkan bahwa semua orang yang berada di Indonesia adalah orang asli Indonesia, namun pada Orde Baru mengenai kewarganegaraan telah dibedakan menjadi WNI dan WNA. Pada kenyataannya, masih saja ada praktek diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa yang berada di kantor catatan sipil sehubungan dengan penggolongan penduduk tersebut. Salah satu contoh dalam sikap diskriminasi tersebut di antaranya adanya pengakuan dari sejumlah keturunan Etnis Tionghoa, sering mendapatkan perilaku yang berbeda dengan pribumi saat mengurus KTP ataupun surat-surat resmi yang berhubungan dengan pemerintahan setempat. Kendala yang dimaksudkan di sini seperti proses yang lama, ketentuan ketentuan yang lebih banyak, dan dana yang dikeluarkan lebih dari warga pribumi. Hal ini dianggap sebagai diskriminasi yang nyata di kehidupan sehari-hari Etnis Tionghoa (Jahya,1994:68).

Pengaruh dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa Orde Baru ini untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan yang sebelumnya telah dikeluarkan pada masa Orde Lama. Namun perubahan ini juga memiliki perubahan yang besar terhadap segala aspek yang telah dianut oleh Etnis Tionghoa, diantaranya:

#### **5.1.1 Interaksi Sosial Etnis Tionghoa**

Pada tahun 1965 terjadi pergolakan politik yang maha dahsyat di Indonesia, yaitu pergantian orde, dari Orde Lama ke Orde Baru. Orde Lama memberi ruang kepada Partai Komunis di Indonesia, sedangkan Orde Baru membasmi keberadaan Partai Komunis di Indonesia. Bersamaan dengan perubahan politik tersebut, rezim Orde Baru melarang segala sesuatu yang berbau Cina. Segala kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina tidak boleh dilakukan lagi. Hal ini dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Di samping itu, masyarakat keturunan Cina dicurigai masih memiliki ikatan yang kuat dengan tanah leluhurnya dan rasa nasionalisme mereka terhadap Negara Indonesia masih diragukan. Akibatnya, keluarlah kebijakan yang sangat



diskriminatif terhadap masyarakat keturunan Cina baik dalam bidang politik maupun sosial budaya.

Dilihat dari segi *spasial*, korban utama atau target utama dari kekerasan yang terjadi, hubungan kontekstual ekonomi-politik, yang menjadi korban atau target kekerasan adalah warga kelompok Tionghoa beserta seluruh infrastrukturnya. Atas kejadian ini masyarakat bereaksi dengan mencurahkan kepedulian yang dalam. Pemerintah, kaum intelektual, tokoh-tokoh agama, seniman, dan budayawan semua diliputi perasaan sedih. Perasaan tersebut seolah memicu perdebatan politik budaya dalam tahun itu. Kepedulian yang muncul saat melihat bagaimana ungkapan rasa keprihatinan yang pada akhirnya berujung pada sikap ekstrim. Semua seakan dipaksa untuk berkontemplasi dan melakukan reinterpretasi fenomena kerukunan kehidupan bernegara yang selama ini dipraktikkan.

Orang-orang Etnis Tionghoa yang menjadi “korban politik-mangsa konflik” tersebut kemudian dievakuasi ke lokasi steril dari serbuan massa. Peristiwa tadi mengingatkan pada peristiwa yang terjadi pada tahun 1980 yang disebut Peristiwa Toko La. Peristiwa ini tak lepas dari semangat "benci Cina" pada waktu itu. Waktu itu, seorang warga Cina, pemilik Toko La di Jalan Sungai Calendu, menghamili pembantunya, Orang Toraja. Lalu membunuhnya ketika wanita malang ini minta dinikahi. Tindakan bejat oknum warga keturunan itu menyebar, sampai akibatnya orang-orang Cina di Makassar dipukuli habis-habisan. Perusakan barang-barang berbau Cina terjadi hampir di seluruh penjuru kota. Tercatat 1.123 rumah dan toko, 29 mobil dan 42 sepeda motor dirusak. Untungnya, pasukan keamanan cepat bergerak dan kerusakan tidak meluas. Konflik ini ternyata tetap menjadi bara dalam sekam. Kemajuan perekonomian Makassar dianggap mayoritas masyarakat hanya dinikmati warga keturunan Cina. Dan anggapan itu menimbulkan kecemburuan sosial. Maklum, seluruh wilayah pemukiman elit dan kawasan utama kota, juga pusat perdagangan, dimiliki oleh Etnis Tionghoa (pada situs <http://www.oocities.org/apii-berlin/ujung.html>, 18 Februari 2016)

Permasalahan yang didapat di kehidupan sehari-hari seperti ini mengakibatkan pemerintah tidak hanya tinggal diam. Langkah pertama yang paling mendasar yang diambil pemerintah dalam penghapusan diskriminasi tersebut yaitu dengan mengambil tindakan-tindakan antara lain menghilangkan beberapa perbedaan atau tanda-tanda khusus yang akan membedakan WNI dan WNA keturunan. Bukti dari tindakan tersebut adalah pada awal tahun 1990-an pemerintah menghimbau agar istilah “pribumi” dan “non-pribumi” segera dihapuskan dan ditinggalkan (Naveront, 1994:83). Penghapusan ini akan lebih mudah menghindarkan Indonesia dari perselisihan akibat SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan).

Perselisihan tidak dapat dihindarkan dari Etnis Tionghoa dan Pribumi. Makassar pada bulan September 1997 mengalami ketegangan. Ketegangan yang terjadi pada saat itu dikenal sebagai Makassar Membara. Tak ada yang menduga di penghujung tahun terjadi tragedi yang mengerikan. Peristiwa tersebut menyebabkan lima orang tewas, 13 mahasiswa mengalami luka tembak, dan 116 orang ditahan. Selain itu 80 mobil rusak dan dibakar, 168 sepeda motor habis dibakar, yang paling banyak adalah bangunan dan toko yang dirusak, jumlahnya mencapai 1.471 buah. Hal ini dipicu oleh mengamuknya Benny Karre, seorang penjual botol yang keturunan Cina, Senin malam, tanggal 15 September 1997, tepatnya pukul 19.35. Ia membacok tewas gadis 9 tahun yang masih duduk di bangku kelas IV SD Mangkura, Anni Mujahidah Rasuna. Benny membacok kepala Anni di tanah berkali-kali sampai tak bisa dikenali lagi. Kepala Anni lepas dari tubuhnya. Benny akhirnya mendapat amukan massa hingga nyawanya tak terselamatkan. Amuk massa belum selesai sampai di situ. Pribumi yang menjadi penuh kebencian lalu menghancurkan ruang dalam rumah Benny, dan selanjutnya, menjalar ke rumah rumah warga Tionghoa di sekitarnya (wawancara dengan Tang, 10 Oktober 2015)

Di distrik pecinan (Jalan Sulawesi, Irian, Nusantara, Lembeh, Bali, Bonerate, dan sekitarnya) yang merupakan basis utama permukiman orang-orang Tionghoa bagai kota mati. Nafas Etnis Tionghoa terasa berhenti berdenyut dan situasi mencekam. Etnis Tionghoa pada saat itu dihadapkan pada pilihan bertahan

di dalam rumah atau keluar rumah yang akan menjadi mangsa konflik. Melihat kondisi yang demikian, sebagian orang memutuskan untuk segera meninggalkan Makassar untuk mengungsi ke sanak keluarga yang jauh untuk menyelamatkan diri. Hasil bidikan seorang fotografer memperlihatkan bagaimana nasib seorang wanita tua yang dipapah oleh dua orang petugas yang tangannya menjinjing bungkusan. Jidatnya ditemplei koyo yang menandakan bahwa wanita tua tersebut sedang kesakitan. Ekspresi wanita tua tadi dan orang-orang yang terkurung di balik pagar rumah yang eksklusif itu (Sutherland, H. dkk: 210)

Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi etnis Tionghoa. Misalnya semua sekolah Tionghoa dilarang di Indonesia. Sejak saat itu semua anak Tionghoa Indonesia harus menerima pendidikan seperti anak orang Indonesia yang lain secara nasional. Bahkan pada jaman orde baru tersebut ada larangan menggunakan istilah atau nama Tionghoa untuk toko atau perusahaan, bahasa Tionghoa sama sekali dilarang untuk diajarkan dalam bentuk formal atau informal. Dampak dari kebijakan orde baru ini selama 30 tahun masyarakat Tionghoa Indonesia tidak dapat menikmati kebudayaabn mereka sebdiri. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.

Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang Tionghoa Indonesia bekerja juga di sana. Agama tradisional

Tionghoa dilarang. Akibatnya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah. Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan.

### **5.1.2 Kebebasan Berekspresi Etnis Tiongha Pada Masa Orde Baru**

Pada awal kedatangan Etnis Tionghoa ke Indonesia tepatnya di Makassar memiliki sifat yang tertutup dalam pergaulannya, hal ini dikarenakan masih kurang mempercayai penduduk setempat untuk beradaptasi lebih lanjut. Terutama pada masa Orde Baru dimana semua kebebasan dilarang untuk menjaga karakter bangsa. Sampai di Makassar sendiri dibangun “China Town” yang menandakan bahwa daerah itu dihuni oleh para Etnis Tionghoa. Sampai saat ini gapura yang bertuliskan hal tersebut masih bisa di lihat di Makassar. China Town ini membuktikan bahwa keberadaan Etnis Tionghoa ada dan berada dilingkungan masyarakat setempat untuk mempermudah dalam beradaptasi.

Selain itu, warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan Tionghoa dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia, dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi Etnis Tionghoa, misalnya semua sekolah Tionghoa dilarang di Indonesia. Sejak saat itu, semua anak Tionghoa Indonesia harus menerima pendidikan seperti anak orang Indonesia lain secara nasional. Bahkan pada jaman Orde Baru tersebut ada larangan menggunakan istilah atau nama Tionghoa untuk toko atau perusahaan. Bahasa Tionghoa sama sekali dilarang untuk diajarkan dalam bentuk formal maupun informal. Dampak dari kebijakan Orde Baru ini ialah selama 30 tahun masyarakat Tionghoa Indonesia tidak dapat menikmati kebudayaannya sendiri. Pertunjukan kesenian *barongsai* secara terbuka, perayaan Hari Raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa

Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional, karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Etnis Tionghoa berjuang hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan Pemerintahan Indonesia (Kakarisah, 2010).

Paguyuban Etnis Tionghoa Indonesia, yang mendapati sebuah keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah, merasakan adanya diskriminatif yang lebih menyulitkan. Hal ini dikarenakan perbedaan antara keputusan yang dibuat pada masa Orde Lama dan keputusan yang dibuat pada masa Orde Baru. Pada Orde Lama, kegiatan Etnis Tionghoa lebih dibebaskan dan lebih mudah bergerak. Namun, pada masa Orde Baru semua gerak-gerik yang dilakukan dibatasi dan harus dilaporkan. Pemerintah sendiri melakukan hal tersebut karena memiliki alasan yang khusus yaitu tidak menginginginkan identitas Cina ini semakin kuat ketika pemerintah Orde Baru memberikan kebebasan Etnis Tionghoa dalam melakukan kegiatan kulturalnya. Dengan demikian, pengembangan simbol-simbol yang ditimbulkan akan bisa membatasi permasalahan yang ada sehingga proses asimilasi akan mudah dilakukan (Wawancara dengan Tang, 10 Oktober 2015)

## **5.2 Perkembangan Sosial-Ekonomi Etnis**

Pada tahun 1965 terjadi pergolakan politik yang maha dasyat di Indonesia, yaitu pergantian orde, dari orde lama ke orde baru. Orde lama yang memberi ruang adanya partai Komunis di Indonesia dan orde baru yang membasmi keberadaan Komunis di Indonesia. Bersamaan dengan perubahan politik itu rezim Orde Baru melarang segala sesuatu yang berbau Cina. Segala kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat-istiadat Cina tidak boleh dilakukan lagi. Hal ini dituangkan ke dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.14 tahun 1967. Di samping itu, masyarakat keturunan Cina dicurigai masih memiliki ikatan yang kuat dengan tanah leluhurnya dan rasa nasionalisme mereka terhadap Negara Indonesia diragukan. Akibatnya, keluarlah kebijakan yang sangat diskriminatif

terhadap masyarakat keturunan Cina baik dalam bidang politik maupun sosial budaya. Di samping Inpres No.14 tahun 1967 tersebut, juga dikeluarkan Surat Edaran No.06/Preskab/6/67 yang memuat tentang perubahan nama. Dalam surat itu disebutkan bahwa masyarakat keturunan Cina harus mengubah nama Cinanya menjadi nama yang berbaur Indonesia, misalnya Liem Sioe Liong menjadi Sudono Salim. Selain itu, penggunaan bahasa Cinapun dilarang. Hal ini dituangkan ke dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 286/KP/XII/1978. Tidak hanya itu saja, gerak-gerik masyarakat Cinapun diawasi oleh sebuah badan yang bernama Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) yang menjadi bagian dari Badan Koordinasi Intelijen (Bakin).

Di samping Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967, dikeluarkan juga Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967 tentang Masalah Cina. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa masyarakat keturunan Cina harus mengubah nama Cina-nya menjadi nama yang berbaur Indonesia, misalnya Liem Sioe Liong menjadi Sudono Salim. Selain itu, penggunaan bahasa Cina juga dilarang. Hal ini dituangkan ke dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 286/KP/XII/1978. Tidak hanya itu saja, gerak-gerik masyarakat Cina pun diawasi oleh sebuah badan yang bernama Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) yang menjadi bagian dari Badan Koordinasi Intelijen (Bakin). (Kakarisah, 2010: -). Beberapa peraturan yang mengatur eksistensi Etnis Cina di Indonesia di antaranya:

1. Keputusan Presiden Kabinet Nomor. 127/U/KEP/12/1996 tentang Masalah Ganti Nama;
2. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 37/U/IV/6/1967 tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina, yang wujudnya dibentuk dalam Badan Koordinasi Masalah Cina, yaitu sebuah unit khusus di lingkungan Bakin;
3. Surat Edaran Presidium Kabinet RI Nomor SE-06/PresKab/6/1967 tentang Masalah Cina;
4. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 37/U/IN/6/1967 tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina, yang salah satunya mengatur di setiap sekolah nasional yang memiliki murid warga negara asing, jumlah murid

warga negara Indonesia secara keseluruhan maupun di setiap kelas harus lebih banyak daripada jumlah murid-murid warga negara asing;

5. Instruksi Menteri Dalam Negara Nomor 455.2-360/1968 tentang Penataan Kelenteng-Kelenteng di Indonesia; dan
6. Surat Edaran Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika Nomor 02/SE/Ditjen/PP6/K/1988 tentang Larangan Penerbitan dan Pencetakan Tulisan/Iklan Beraksen dan Berbahasa Cina.

Peristiwa-peristiwa tadi bukanlah *preamble* bagi peristiwa-peristiwa lain yang pernah terjadi di Makassar. Meski konteksnya berbeda dengan peristiwa yang sudah disebutkan namun dari letupan ini menghentak sukma aparat birokrasi. Peristiwa itu adalah sebuah demonstrasi yang seolah menjadi gerakan *counterpart* Tionghoa Makassar di tahun 1960. Pribumi meminta Gubernur Sulawesi Andi Pangerang Pettarani untuk meninjau kembali larangan berdagang bagi Etnis Tionghoa di luar Kota Makassar. Tuntutan itu diajukan sebagai jawaban atas terbitnya surat edaran gubernur yang tidak mengizinkan orang-orang Tionghoa berdagang di daerah-daerah. Tujuh bulan setelah edaran itu dikeluarkan pengadilan Sulawesi Selatan dan Tenggara selaku penguasa dagang daerah mengeluarkan perintah agar semua rumah-rumah orang Tionghoa diawasi secara ketat. Kebijakan itu diambil mungkin didasarkan atas realitas keteguhan sikap Etnis Tionghoa yang tetap mempertahankan ke-tionghoan-nya, menutup diri terhadap tradisi dan enggan untuk mengintegrasikan diri secara total ke dalam masyarakat dan kebudayaan Indonesia.

Kebebasan berusaha Etnis Tionghoa dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya pada masa Orde Baru mengalami berbagai persoalan. Pada Tahun 1997, Lippo Grup membangun pemukiman alternatif di Tanjung Bunga, Taman Toraja. Warga kelas menengah kemudian berbondong-bondong mendatangi pengembang. Lagi lagi masyarakat pribumi dikecewakan karena Taman Toraja sudah nyaris menjadi Pecinan baru, dibeli oleh warga keturunan Cina. Kawasan elit Panakkukang Mas Makassar yang dulu kampung miskin Paropo, awal dekade 1980-an dibangun, yang diiringi dengan tangisan para penghuninya. Pribumi mengalah dengan janji akan mendapat tempat, setidaknya di salah satu sudut

kawasan itu. Tapi pengembang Panakkukang Mas, PT Asindo Indah Griyatama tak kurang akal, sebanyak 300 kepala keluarga mulanya dibangun pasar tradisional yang sempat dipuji para pakar sebagai contoh pemukiman modern yang tidak mengorbankan rakyat kecil. Tapi hal itu berlangsung singkat, warga yang menjual murah tanahnya itu, kemudian dihalau secara perlahan dari tempat ini. Dan kini, Panakkukang Mas tampil mentereng, dengan kerlip lampu merkuri hingga di taman tamannya. Hampir seluruh penghuninya Etnis Cina. Peristiwa-peristiwa tersebut itu yang menyebabkan amuk warga tak terelakkan ketika mendengar kabar pembunuhan oleh Benny Karre yang seorang keturunan Cina.

Sejak Orde Baru istilah Tionghoa tidak pernah dipakai sebagai sebuah wacana untuk mengapresiasi esensi kemanusiaan dalam komunitas yang plural. Pemberian label Cina pada orang Tionghoa lebih didasarkan atas kebencian pribumi kepada Cina yang komunis dan menghina Etnis Tionghoa. Cina pun dituduh berada di balik aksi-aksi kelompok “radikal kiri” yang merongrong keutuhan negara. Seiring dengan itu, pada tahun 1966 pemerintah Orde Baru mengambil kebijakan terhadap etnis minoritas yang dianggap berbahaya dan menggantikan Tionghoa menjadi Cina untuk menyebut orang Tionghoa dan Tiongkok. Entah didasari oleh pengalaman historis pada zaman kolonial Belanda istilah Cina dipakai kembali sebagai makna yang mengintimidasi, menghina, dan meremehkan. Pada tahun 1995, dicetuskan proyek wisata terpadu untuk mengembangkan Pantai Losari. Awalnya gagasan tersebut disambut rakyat dengan suka cita. Apalagi, ketika Januari 1996, proyek pembangunan rumah sangat sederhana di kawasan Tanjung Merdeka sebagai bagian dari proyek tersebut diwujudkan. Banyak yang berharap orang-orang kecil bakal mendapat tempat di sana. Yang terjadi kemudian ternyata jauh dari harapan, rumah sangat sederhana itu malah dijual Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan investor Lippo Grup kepada warga keturunan Cina yang berharap dapat menjualnya kembali, jika harga tanah di situ berlipat ganda. Masyarakat yang mendengarkan kejadian itu mulai untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah setempat (wawancara dengan Ko Fanny, 12 Oktober 2015)



Perekonomian Etnis Tionghoa pada masa Orde Baru bisa dilihat melalui tabel kualitatif Mata Pencaharian Orang Tionghoa sebagaimana dianalisis oleh J.A.C. Mackie dalam Wang Gungwu, *Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara* (Wang, 1991:322-324)



Tabel 5.1 Peran Mata Pencaharian Orang Cina di Indonesia 1930 – 1986

Mata pencaharian	1930-an	1941-1958	1959-1966	1967-1986
Pemilikan tanah dan pertanian	Pemilik tanah oleh orang Cina umumnya dilarang, kecuali di Kalimantan Barat, Bangka, dan beberapa tempat di Jawa & Sumatera. Mula-mula ada banyak kulidi perkebunan Sumatera Timur. Pada 1930 jumlah itu menyusut. Banyak orang Cina aktif sebagai tengkulak, dan dalam perdagangan ikan serta penggilingan beras.	Terjadi sedikit perubahan. Ada beberapa penciptaan peran tertentu, misalnya larangan pemilikan penggilingan beras oleh orang asing pada 1954.	Terjadi sedikit perubahan. Beberapa perkebunan kecil dimiliki oleh orang Cina. Undang-undang Agraria secara formal mengizinkan semua warga negara Indonesia memiliki tanah, tetapi dalam praktek WNI keturunan asing praktis dikecualikan.	Terjadi sedikit perubahan. Kadang-kadang adalah laporan pembelian/ penyewaan tanah di desa-desa, tetapi jarang berukuran besar.
Perdagangan	Orang Cina dominan dalam perdagangan eceran, juga grosir serta ekspor-impor (didominasi Belanda) pada tingkat yang lebih rendah. Banyak tengkulak Cina dan sejumlah penjaja	Ada beberapa perubahan kecil—sejumlah orang Cina memasuki bisnis grosir dan ekspor-impor, meskipun orang Belanda masih dominan dalam bidang itu. Kebijakan Benteng mendorong bisnis	Terjadi sejumlah perubahan besar. Setelah pengambilalihan perusahaan Belanda, orang Cina bergerak masuk ke dalam beberapa peran puncak, walau perusahaan-perusahaan negara	Perusahaan Cina kini dominan di sebagian besar sektor, seringkali berpatungan dengan perusahaan transnasional, terutama pada perdagangan tingkat tinggi. Muncul banyak perusahaan besar Cina, kebanyakan memiliki koneksi politik dengan

Mata pencaharian	1930-an	1941-1958	1959-1966	1967-1986
	kelilingkecil- kecilan.	pribumisecara tidak efektif, memacu hubungan“Ali Baba”.	memonopoli banyakbidang.	penguasa. Perdagangan padatmodal dan berteknologi tinggi kebanyakan didominasi orang Cina.
Keuangan dan Pasar Properti	OrangCinaaktif dalam peminjaman uang tingkat bawah, pegadaian, dan lain-lain, tetapi tidak dalam perbankan atau asuransi.	Bank-bank swasta Cina berskala kecil muncul, tetapi Belanda masih mendominasi sektor ini.	Bank-bank negara mengambil alih peran bank-bank Belanda, tetapi sejumlah bank dari lembaga kredit Cina tumbuh terus dalam kondisi inflasi yang mengganggu karena lebih dapat beradaptasi. Pasar gelap valuta asing dikontrol dari Glodok.	Perbankan deposit masih didominasi bank pemerintah, tetapi beberapa bank swasta Cina tumbuh pesat (BCA, Panin, dll) menantang bank-bank asing. Mata rantai internasional perusahaan Cina berkembang pesat. Pasar properti didominasi orang Cina.
Industri Manufaktur, pengolahan, dan lain-lain	Orang Cina dominan dalam usaha penggilingan beras, pengolahan pangan berskala kecil, pabrik es, beberapa pabrik kretek, batik dan tekstil kecil. Tetapi beberapa industri yang lain mulai	Terjadi sedikit perubahan, kecuali meningkatnya peran dalam pertekstil dan beberapa bagian lain dari suatu sektor industri yang masih muda.	Terjadi sedikit perubahan, kecuali meningkatnya peran industri kretek. Usaha penggilingan beras dan tekstil tidak lagi menguntungkan. Kondisi ekonomi umumnya tidak menguntungkan, tetapi	Terjadi perubahan besar – orang Cina menonjol dalam ekspansi industri pasca – 1970 yang dramatis pada banyak sektor (kecuali penggilingan beras, gulung tikar), biasanya sebagai mitra usaha patungan dengan

Mata pencaharian	1930-an	1941-1958	1959-1966	1967-1986
	bermunculan.		orang Cina lebih mampu bertahan.	perusahaan asing.
Pengangkutan	Relatif sedikit yang bergerak di bidang transportasi darat (truk, bus, taksi) dan pelayaran lokal berskala kecil. Belanda mendominasi pelayaran antarpulau dan internasional.	Peran orang Cina dalam pelayaran meluas selama Perang Dunia II dan revolusi, walau KMP masih dominan. Perusahaan armada truk dan bus Cina masih menonjol, tapi persaingan dari perusahaan negara dan swasta pribumi memuncak.	Perusahaan pelayaran Cina mendominasi perniagaan antarpulau setelah disingkirkannya KMP. Perusahaan armada bus dan truk Cina beroperasi dalam keadaan sangat sulit karena kekacauan ekonomi.	Perusahaan pelayaran Cina dominan, kendati perusahaan pribumi berkembang. Perusahaan armada bus dan truk Cina berkembang subur dalam kondisi ekonomi yang meningkat, meskipun ada beberapa peraturan yang membantu pesaing pribumi
Jasa, profesi, dan lain-lain	Orang Cina terpelajar mulai bekerja sebagai pengacara, dokter gigi, dokter mata, akuntan, dan pengajaran. Juga sebagai tukang emas permata, pengusaha restoran, binatu, dan pemangkas rambut. Sebagian orang Cina berprestasi sebagai	Terjadi perubahan kecil—peningkatan jumlah orang Cina pada kategori-kategori di atas. Tidak banyak orang Cina yang masuk kedalam dinas pemerintahan. Hampir tidak ada orang Cina di Angkatan Bersenjata.	Kaum profesional Cina memperoleh manfaat dari pengusiran terhadap orang Belanda, tetapi kompetisi dari pesaing pribumi menimbulkan kendala yang semakin besar untuk memasuki berbagai bidang.	Diskriminasi dan pengekangan untuk masuk ke profesi meningkat lebih lanjut. Tidak banyak guru atau wartawan yang tersisa, para dokter menghadapi banyak kesulitan, jumlah politisi dan pejabat Cina lebih sedikit dari sebelumnya. Beberapa bintang olahraga Cina menonjol

Mata pencaharian	1930-an	1941-1958	1959-1966	1967-1986
	wartawan, penulis, penyanyi, bintang film, olahragawan, dan lain-lain.			dengan sangat baik dan berkembang.
Buruh terampil dan tidak terampil	Banyak kuli Cina yang bekerja di pertambangan timah dan perkebunan di Sumatera Timur (tetapi terus menerus digantikan oleh buruh Jawa). Banyak pulayang bekerja pada perusahaan-perusahaan Cina di kota-kota besar.	Tidak ada lagi buruh Cina di perkebunan. Orang Cina yang masih bekerja di pertambangan timah jumlahnya kian menyusut. Terjadi pergeseran umum ke atas menuju pekerjaan yang berstatus lebih tinggi dan lebih membutuhkan keterampilan (misalnya, tukang atau pedagang kecil).	Peningkatan berlanjut. Ada tekanan lebih besar terhadap perusahaan-perusahaan Cina untuk mempekerjakan pekerja pribumi.	Tidak banyak lagi orang Cina yang bekerja sebagai tenaga kasar, kecuali kaum tua.

Sumber: J.A.C. Mackie dalam Wang Gungwu, *Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara* (Wang, 1991:322-324)

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Etnis Tionghoa dari masa ke masa mengalami kemajuan yang signifikan walaupun terkendala oleh kebijakan-kebijakan yang tarik ulur. Mengenai keberadaan Etnis Tionghoa di Makassar sampai saat ini masih bisa dipertahankan dengan membangun sebuah kompleks perumahan khusus Tionghoa. Hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan baik dengan Etnis Tionghoa pendatang lainnya.

### **5.3 Kestinambungan Sosial-Ekonomi Etnis Tionghoa**

Mengenai kestinambungan yang terjadi pada Etnis Tionghoa pada masa Orde Baru terutama pada sosial-ekonomi adalah hubungan Etnis Tionghoa yang pada masa sebelumnya masih bersifat tertutup terhadap pribumi, untuk saat ini telah membuka diri walaupun tidak serta merta.. Kehidupan Etnis Tionghoa di Makassar masih bersifat kelompok walau pada kenyataannya Etnis Tionghoa telah bekerja sama dengan baik bersama para pribumi untuk memperlancar dan mengembangkan perekonomian

Kestinambungan yang terjadi pada Etnis Tiongho juga dapat dilihat dengan melihat berbagai aspek, diantaranya:

#### **1. Sistem Kekerabatan**

Etnis tionghoa pada masa lalu membuat sebuah pembaharuan yang berdasarkan ideology-nya. Kehidupan Etnis Tionghoa sejak dulu telah teratur dan teroganisir. Saat suku lain masih berpindah-pindah tempat, etnis ini sudah mulai menetap. Dimana suatu kelompok sudah mulai hidup menetap, kelompok itu akan lebih berkembang karena waktu yang dimilki-nya untuk kebutuhan hidup lebih banyak. Sehingga hal tersebut dapat memacu berkembangnya teknologi guna melengkapi kebutuhan hidup.

#### **2. Pemilihan Jodoh**

Pada masa Orde Baru ini tidak banyak mengalami perubahan namun lebih berkembang dalam pemilihan jodoh yang akan dipilih. Etnis Tionghoa di Makassar lebih memilih kebebasan dalam pemilihan jodoh dengan satu syarat yaitu satu keyakinan. Hal ini guna memperluas proses perkembangan ekonomi

yang telah dirintis. Jadi tidak harus dengan marga yang sama melainkan berbeda margapun tetap akan dirundingan dengan sanak saudara demi untuk menyebarkan bisnis yang Etnis Tionghoa kembangkan.

### 3. Perkawinan

Pada perkawinan Etnis Tionghoa terutama di Makassar pada masa Orde Baru tidaklah berbeda dengan perkawinan yang berasal dari Orde Lama. Namun pada Masa Orde Baru ditambahkan dengan upacara pemotongan kue, perayaan besar yang bisa diselenggarakan pertunjukan dan lain sebagainya. Nilai dalam pernikahan dalam masa Orde Baru lebih diperdalam, hal ini dikarenakan perayaannya sendiri dibatasi oleh adanya larangan untuk melakukan perayaan yang berlebihan.

### 4. Adat menetap sesudah menikah

Pada adat istiadat setelah menikah pada masa orde baru lebih lengkap yang perlu disiapkan. Dalam adat Tionghoa, ahli waris akan di teruskan oleh anak laki-laki tertua dalam suatu keluarga dan akan meneruskan pemujaan leluhur yang dilakukan oleh ayahnya. Oleh karena itu pihak wanita yang telah menikah diwajibkan hidup dan tinggal bersama keluarga pihak suami. Pada prinsipnya setiap anak diwajibkan untuk tetap berbakti pada orang tua-nya sebelum maupun setelah menikah. Hal ini akan menjadi gambaran bagi generasi penerus dalam berbakti pada orang tuannya. Namun untuk anak laki-laki selanjutnya diberi kebebasan dalam menentukan tempat tinggalnya sesudah menikah. Mengenai tugas para lelaki yang telah menikah yaitu diwajibkan melanjutkan ritual yang secara turun temurun dilakukan oleh keluarganya yaitu peringatan keluarga terdahulu, biasanya dilakukan dirumah namun juga bisa dilakukan langsung dilakukan dipemakaman. Kesenambungan dalam menjalankan tradisi telah dilakukan secara turun temurun walau ada yang berubah dalam prakteknya namun inti dari peringatan tersebut tetap sama.

### 5. Kedudukan Wanita

Pada masa lalu para wanita Etnis Tionghoa mengalami diskriminasi gender yang sangat kuat. Adanya perbedaan perlakuan yang diterimanya sangat berbeda dengan pria. Saat para wanita Etnis Tionghoa mulai beranjak dewasa, mulai

mengalami larangan untuk keluar rumah (di pingit). Dan saat sudah menikah para wanita juga tidak di perkenankan untuk memilih tempat tinggal, melainkan harus tinggal bersama suaminya serta mereka wajib untuk patuh dan tunduk pada mertuanya. Para wanita juga mendapat larangan untuk mendapat bagian kehidupannya diluar rumah (Lubis, M: 1995,13-27)

Pada masa kini hal tersebut sudah mulai di tinggalkan, para wanita sudah mulai bergabung dengan perkumpulan-perkumpulan di luar. Selain itu para wanita juga berhak mendapatkan harta yang sama. Bahkan dalam memuja para leluhur terdahulu telah di wariskan kepada anak cucunya, hal ini membuat para suami terkadang harus tinggal bersama dengan istrinya. Dengan adanya pembaharuan kedudukan wanita saat ini, sehingga kecenderungan untuk memiliki anak laki-laki tidak lagi sekuat seperti pada masa lalu.

#### 6. Ekonomi

Pada perkembangan yang terjadi pada Masa Orde baru mengenai Ekonomi Etnis Tionghoa bisa dikatakan tidak banyak mengalami perubahan yaitu masih berjalan pada sektor wirausahawan dan juga berdagang. Hal ini dikarenakan adanya kesulitan dalam memperoleh pekerjaan di bidang pemerintahan sendiri. Di Makassar sendiri mengenai sistem perekonomiannya masih berkelanjutan dan melanjutkan dari generasi sebelum-sebelumnya guna mengembangkan usaha yang dikerjakan,



## BAB 7. PENUTUP

### 7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi sumber yang penulis lakukan, dapat ditarik tiga kesimpulan. Kesimpulan pertama, Etnis Tionghoa yang memasuki Kota Makassar pada abad ke-17 sampai dengan abad ke-20 banyak mengalami kendala baik didalam masyarakat dan juga kendala dalam perkembangan ekonomi yang telah di jalankan. Pada masyarakat sekitar Etnis Tionghoa pada kala itu mulai membaaur dengan masyarakat sekitar karena beringinan untuk beradaptasi dan memulai sebuah hubungan dalam perdagangan yang dijalankan. Hingga pada akhirnya banyak Etnis Tionghoa yang menikahi warga pribumi. Namun dalam hal kewarganegaraan Etnis Tionghoa kala itu lebih memilih memiliki 2 kewarganegaraan yaitu Tiongkok dan Indonesia. Mengenai kondisi ekonomi Etnis Tionghoa menjelang Orde baru pada saat itu sangatlah memuaskan, hal ini dikarenakan bisnis yang dijalankan tidak banyak mengalami kendala. Perkembangan ini didapat karena adanya campur tangan sanak saudara yang berada di daerah asal dan juga yang berada di Makassar.

Kesimpulan kedua, pada masa Orde Baru terdapat berbagai pertikaian yang terjadi antara Etnis Tionghoa dengan penduduk pribumi. Konflik yang terjadi pada awalnya dimulai dengan kejadian Toko La dan pembunuhan yang dilakukan oleh Benny Kerre terhadap salah satu anggota keluarga masyarakat setempat. Pada akhirnya berkelanjutan aksi persaingan terhadap perkembangan bisnis. Pada kala itu kedudukan Etnis Tionghoa dirasa cukup tinggi dibandingkan dengan masyarakat pribumi, hal inilah yang membuat beberapa kesempatan berbisnis dan berdagang dikuasai oleh Etnis Tionghoa. Pada akhirnya pemerintah membuat sesuatu keputusan mengenai larangan berbisnis Etnis Tionghoa hanya sebatas kecamatan hal ini guna memberikan hak bagi masyarakat sekitar untuk berbisnis. Sedangkan mengenai ekspresi keagamaannya juga dibatasi guna mempertahankan karakter bangsa Indonesia sehingga tidak luntur karena datangnya Etnis yang lain.

Kesimpulan ketiga, nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam diri Etnis Tionghoa secara umum dapat dilihat dalam keuletannya dalam bekerja. Rasa persatuan Etnis Tionghoa dalam komunitasnya terkenal sangat kuat dikarenakan mereka merasa senasib sepenanggungan dan sama-sama merantau di tanah orang. Dalam bidang ekonomi, Etnis Tionghoa dikenal sebagai pengusaha yang sukses. Kesuksesan ini dikarenakan mereka adalah pengusaha yang ulet, mereka telah mengalami perjalanan yang panjang hingga sampai saat ini. Semua kendala yang ditemui dilalui tanpa mengenal putus asa. Hal inilah yang memberikan ciri khusus bahwa Etnis Tionghoa tidak pernah main-main dalam melakukan usaha apapun. Pada Masa Orde Baru meskipun mendapatkan kesulitan yang cukup besar, dalam hal apresiasi keagamaannya namun dengan proses yang panjang Etnis Tionghoa bisa melaluinya dan telah beradaptasi dengan sekitarnya.

## 8.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, pemerintah hendaknya lebih mengawasi kebijakan-kebijakan yang diciptakan agar sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh semua pihak. Bukankah negara kita negara kesatuan yang adil dan makmur oleh karena itu, diskriminasi yang masih ada diharapkan dapat dihapuskan. Tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya dan tidak ada pula kedudukan yang lebih rendah.
2. Bagi masyarakat luas, masyarakat seharusnya lebih memahami arti persamaan dan memelihara hubungan baik antar sesama. Jangan gunakan konflik antar golongan yang pernah terjadi sebagai pemicu perpecahan, namun gunakan untuk lebih memahami hak asasi setiap manusia, setiap golongan. Perasaan tidak senang dan prasangka buruklah yang akan membuat sebuah ledakan besar yang cukup untuk membuat konflik serupa timbul kembali di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Bachrun, R. 2003. *Cina Peranakan Makassar*. Makassar: Yayasan Baruga Nusantara.
- Gottschalk, L. *Understanding History: a Primer of Historical Method*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. 1998. Jakarta: UI-Press.
- Handoko, H. 1996. *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa*
- Harry, P. 2005. *Orang Cina Khek Dari Singkawang*. Depok: Penerbit Komunitas Bambu.
- Hidayat, Z. M. 1993. *Masyarakat dan Kebudayaan Cina di Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Idrus, R. 2004. *Budaya Etnis Tionghoa Di Makassar Keping Mozaik Sejarah Budaya Sulawesi Selatan*. Makassar: Bagian Proyek Pemanfaatan Peninggalan Sejarah Dan purbakala Sul-Sel.
- Ihromi, T.O, 2006. "*Pokok-Pokok Antropologi Budaya*". Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jurdi, S. 2010. *Sosiologi Islam & Masyarakat Modern*. Jakarta: Prenada Media Group
- Kuntowijoyo. 1993. *Radikalisme Petani*. Yogyakarta: Bentang Offset.
- Koentjaraningrat. 2003. *Pengantar Antropolagi I*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat, 2009. "*Pengantar Ilmu Antropologi (Edisi Revisi)*". Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kartodirdjo, S. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

- Karton, K. 1998. *Pemimpin dan Kepemimpin*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- L. Edward, 2002. *Makasar Abad XIX*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Mackie, J.A.C. (1991). *Peran ekonomi dan identitas etnis Cina Indonesia dan Muangthai dalam Wang Gung Wu dan Jennifer Cushman, Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara*. Jakarta: Pustaka Utama Grafika.
- Mantra, L.B. 2000. *Demografi umum*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Mattulada. 1974. *Bugis-Makasar: Manusia dan Kebudayaan dalam Terbitan Khusus Berita Antropologi No. 16*. Jurusan Antropologi Fakultas Sastra UI
- Melly G Tan. 2008. *Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia
- M.D. Laode. 1997. *Tiga Muka Etnis Cina*. PT. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika
- M.D. Laode. 2012. *Etnis Cina Indonesia dalam Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Neveront, J. 1999. *Jaringan Masyarakat Cina*. Jakarta: PT Golden Terayon Press.
- Notosusanto, N. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (suatu pengalaman)*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poerwanto, H. 2014. *Cina Khek di Singkawang*. Depok: Komunitas Bambu

Sjamsuddin, H. 1996. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan.

Smelser, N. 1962. *Theory of Collective Behavior*. London: Routledge and Kegan Paul and New York: The Free Press of Glencoe.

Suryadinata, L. 1984. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: PT Temprint

Sutherland, H. 2004. *Sulawesi Selatan Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah*. Yogyakarta: Ombah

Sztompka, P. 2005. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta :Prenada Media Group

Tjiptoherijanto, P. 2000. *Urbanisasi dan Perkembangan Perkotaan di Indonesia*.

Wirawan, Y. 2013. *Sejarah Masyarakat Tionghoa Makasar Dari Abad ke-17 Hingga ke-20*. Jakarta: PT Gramedia

Yang, P. 2007. *Elit Bisnis Cina di Indonesia*. Jakarta: Diadit Media.

David. CL. Ch'ng. 1995. *Sukses Bisnis Cina Perantauan*. Jakarta: Grafiti,PT.Intermasa,

Wastu, P. 1996. *Etika Bisnis Cina*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Umum

Kosasih, W.1995. *Pergulatan Mencari Jati Diri, Seri Dian III*. Yogyakarta

Jennifer G. & Wang G. 1991. *Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara*. Jakarta: PT.Temprint

Liem, Y. 2000. *Prasangka Terhadap Etnis Cina*. Jakarta: Djambatan

Lubis, M. 1995. *Pribumi Di Mata Orang Cina*. Medan : Pustaka Widayasan.

**Internet:**

<http://www.oocities.org/apii-berlin/ujung.html>, 29 September 2015

<http://indonesiareview.com/satrio/serbuan-orang-orang-cina>. 29 September 2015

Kakarisah. 2010. *Perkembangan Etnis Tionghoa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Jakarta.  
(online),(<http://kakarisah.wordpress.com/2010/03/09/pers-indonesia-dari-masa-ke-masa/>), diakses tanggal 16 Februari 2016).

**Skripsi:**

Vinia, A. V. 2005. “*Politik Pemerintah Indonesia Terhadap Etnis Tionghoa di Kudus Pasca G. 30 S/PKI (1965-1998)*”. Tidak Diterbitkan. Skripsi. Semarang.

Puspitawati, M. “*Dinamika Sosial Budaya Etnis Tionghoa di Kabupaten Jember 1965-2011*”. Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: Upt Universitas Jember

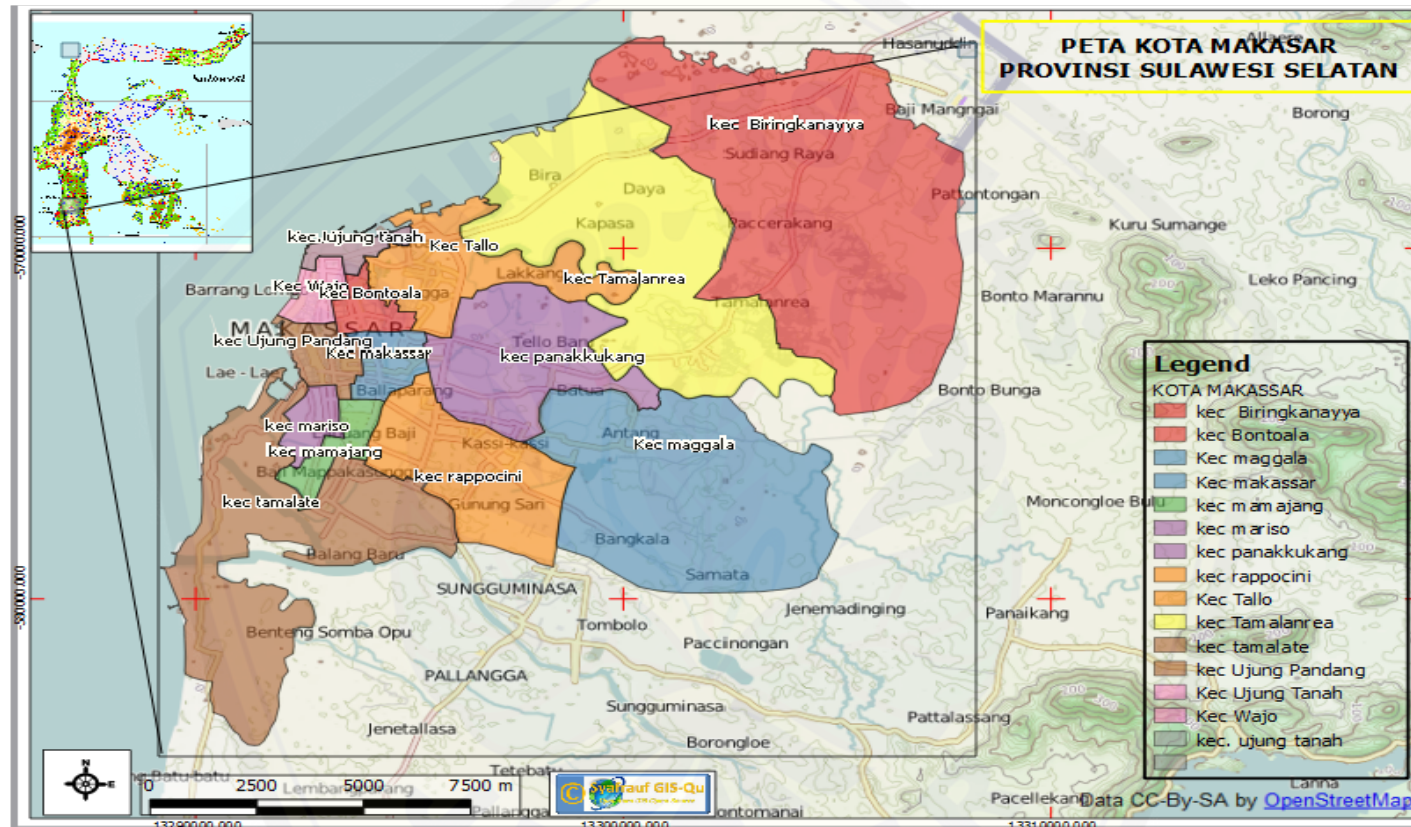
## LAMPIRAN A. MATRIK PENELITIAN

Topik	Judul Penelitian	Jenis dan Sifat Penelitian	Permasalahan	Sumber Data	Metode Penelitian
1	2	3	4	5	6
<b>Sejarah Lokal</b>	Dinamika Sosial-Ekonomi Etnis Tionghoa Di Makassar Pada Masa Orde Baru (1966-1998)	a. Jenis Penelitian: penelitian sejarah. b. Sifat Penelitian: studi pustaka	1. bagaimana kondisi sosial-ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar menjelang Orde Baru?; 2. bagaimana perkembangan, perubahan, dan kesinambungan kondisi sosial-ekonomi etnis Tionghoa di Makassar pada masa Orde Baru (1966-1998)?; dan 3. apa nilai dan norma yang terkandung pada sosial-	Sumber primer dan sumber sekunder yang diperoleh dari : 1. Wawancara orang yang mengetahui langsung kondisi Makassar 2. Museum Makassar 3. Perpustakaan Pusat Universitas Jember. 4. Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Jember. 5. Perpustakaan Pusat	Metode penelitian sejarah, dengan tahap: a. Heuristik. b. Kritik (Verifikasi). c. Interpretasi. d. Historiografi

Topik	Judul Penelitian	Jenis dan Sifat Penelitian	Permasalahan	Sumber Data	Metode Penelitian
1	2	3	4	5	6
			ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar pada masa Orde Baru (1966-1998)?	Makassar 6. Toko-toko buku	



Lampiran B: Peta Makassar



Gambar 1. Peta Makassar

(<https://syafraufgisqu.wordpress.com/2012/10/06/peta-kota-makassar/>)

Lampiran C: Peta Suku Tionghoa-Indonesia



Gamabar 2. Peta Distribusi daerah asal leluhur suku Tionghoa-Indonesia  
(mikeportal.blogspot.com)

## Lampiran D: Pedoman Wawancara

## PEDOMAN WAWANCARA DAN OBSERVASI

No	Data yang diraih	Sumber data	Teknik pengambilan data
1	Kondisi Sosial-Ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar Menjelang Orde Baru <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gambaran umum kota Makassar; keadaan geografis, kependudukan dan keadaan sosial ekonomi</li> </ul>	Kantor BPS (Badan Pusat Statistik) Makassar	Dokumenter
2	Kondisi Etnis Tionghoa Di Makassar Pada Tahun 1965-1998	Pengurus Vihara, masyarakat pecinaan, anggota komunitas Tionghoa	Wawancara dan Dokumenter
3	Nilai Dan Norma Etnis Tionghoa Makassar Pada Masa Orde Baru	Pengurus Vihara, masyarakat pecinaan, anggota komunitas Tionghoa	Wawancara, Dokumenter, Observasi

**Lampiran E: Hasil Wawancara**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tang  
Umur : 62 tahun  
Pekerjaan : Mantan aktivis Makassar  
Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI)  
Alamat : Jl. Sulawesi

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

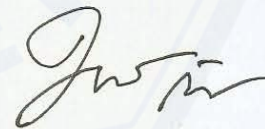
Nama : Kinanthi Nisful Laily  
NIM : 110210302003  
Fakultas/Prodi : FKIP/ Pendidikan Sejarah

Benar-benar telah mengadakan wawancara penelitian guna melengkapi sumber-sumber data penelitian skripsi yang berjudul "*Dinamikan Sosial-Ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar Pada Masa Orde Baru (1966-1998)*"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan kebenaran setiap informasi.

Makassar, 10 Oktober 2015

Responden



(Tang)

Pada tahun 1997 Makassar membara. Hal ini dikarenakan terbunuhnya seorang bocah perempuan yang bernama Ani Mujahidah yang berumur 9 tahun yang masih duduk dibangku kelas IV SD Mangkura oleh Benny Karre yaitu seorang penjual botol keturunan Tionghoa . Saat itu pula Makassar dibanjiri oleh orang-orang yang mengungkapkan rasa kekecewaan atas tewasnya putri pasangan Jubaedi Saleh dan Nur Huda. Masa pada saat itu terhipnotis untuk melakukan hal-hal yang mengerikan seperti pembakaran, penjarahan aset-aset Tionghoa, ratusan motor, dan puluhan bangunan hangus.

Kekacauan tersebut membuat semua aktivitas yang ada di Makassar seolah berhenti beroperasi. Warga setempat dan khususnya orang Tionghoa lebih memilih menutup tokonya dan berlindung di rumah mereka. hal ini dikarenakan mereka tidak ingin menjadi amukan masa. Pada saat itu adalah tahun yang buruk bagi etnis Tionghoa di Makassar.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Robet (keturunan etnis Tionghoa-peranakan)

Umur : 48 tahun

Pekerjaan : Pemilik toko

Alamat : Jl. Sulawesi

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Kinanthi Nisful Laily

NIM : 110210302003


Fakultas/Prodi : FKIP/ Pendidikan Sejarah

Benar-benar telah mengadakan wawancara penelitian guna melengkapi sumber-sumber data penelitian skripsi yang berjudul *Sosial-Ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar Pada Masa Orde Baru (1966-1998)*

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan kebenaran setiap informasi.

Makassar, 10 Oktober 2015

Responden



(Robet)

Distrik Pecinaan yang cukup tua di Makassar berada di Jalan Sulawesi, Irian, Nusantara, Lembah, Bali, Bonerate, dan sekitarnya. Pada distrik yang berada di Jalan Sulawesi pada tahun 1966 merupakan tempat berkumpulnya etnis Tionghoa dalam bidang perdagangan. Pada tahun 1966 ini banyak etnis Tionghoa yang mengalami tekanan batin terhadap kewarganegaraannya. Selain tekanan yang berasal dari diri sendiri, ada pulatekanan yang berasal dari sekelompok etnis Tionghoa yang menambah delima mereka. Tekanan yang diberikan oleh etnis Tionghoa khususnya totok kepada etnis Tionghoa peranakan. Misalnya untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan leluhurnya tanpa pandang bulu. Tekana tersebut juga ditambah dengan ancaman-ancaman terhadap Tionghoa peranakan yang memilih kewarganegaraan Indonesia.

Pada tahun setelah dikemukakan kebijakan tersebut Etnis Tionghoa dan Pribumi hidup di Makassar secara bersama-sama. Kebanyakan dari masyarakat Makassar ini berpekerjaan sebagai pedagang dan pengusaha. Modal yang didapat berasal dari sanak saudaranya yang berada di tempat asalnya atau yang berada di sekitar hingga pada akhirnya perkembangan ekonomi Etnis Tionghoa berkembang pesat. Mengenai sistem yang digunakan pada masa itu masih bersifat memonopoli barang.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Che  
Umur : 38 tahun  
Pekerjaan : Penjaga Klenteng Kwan Kong  
Alamat : Jl. Penghibur

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Kinanthi Nisful Laily  
NIM : 110210302003  
Fakultas/Prodi : FKIP/ Pendidikan Sejarah

Benar-benar telah mengadakan wawancara penelitian guna melengkapi sumber-sumber data penelitian skripsi yang berjudul *Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar Pada Masa Orde Baru (1966-1998)*

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan kebenaran setiap informasi.

Makassar, 10 Oktober 2015

Responden

  
(Che)



Etnis Tionghoa yang berada di Makassar yang tepatnya di Jalan Sulawesi terkenal sebagai tempat etnis Tionghoa tertua di Makassar. Pada hari-hari tertentu masyarakat Tionghoa mengadakan upacara-upacara keagamaan untuk mengucapkan rasa syukur terhadap Dewa. Untuk hari-hari biasa mereka hanya mampir sebentar untuk doa memperlancar bisnis usaha mereka.

Kebebasan yang dirasakan Etnis Tionghoa pada saat itu dirasa cukup lenggang. Hal ini juga bisa dilihat pada lingkungan sekitar Etnis Tionghoa yang pada saat Orde Lama bebas menempelkan iklan atau tulisan dengan bahasa Cina. Vihara atau klenteng bisa ditemukan disetiap sudut kota Makassar. Perayaan untuk hari besar dilakukan dengan sangat meriah dan juga melibatkan seluruh masyarakat pada saat itu. Kepercayaan yang berasal dari Cina seperti Tao, Kong Hu Cu, maupun Konfusianisme bisa dilakukan dengan bebas. Kebebasan inilah yang mengakibatkan kepercayaan tersebut mulai menyebar di kalangan masyarakat setempat.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ko Fanny

Umur : 57 tahun

Pekerjaan : Pengurus Klenteng Si Naga Sakti Xiang Ma (Petugas informasi)

Alamat : Jl. Sulawesi

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Kinanthi Nisful Laily

NIM : 110210302003

Fakultas/Prodi : FKIP/ Pendidikan Sejarah

Benar-benar telah mengadakan wawancara penelitian guna melengkapi sumber-sumber data penelitian skripsi yang berjudul *Sosial-Ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar Pada Masa Orde Baru (1966-1998)* .

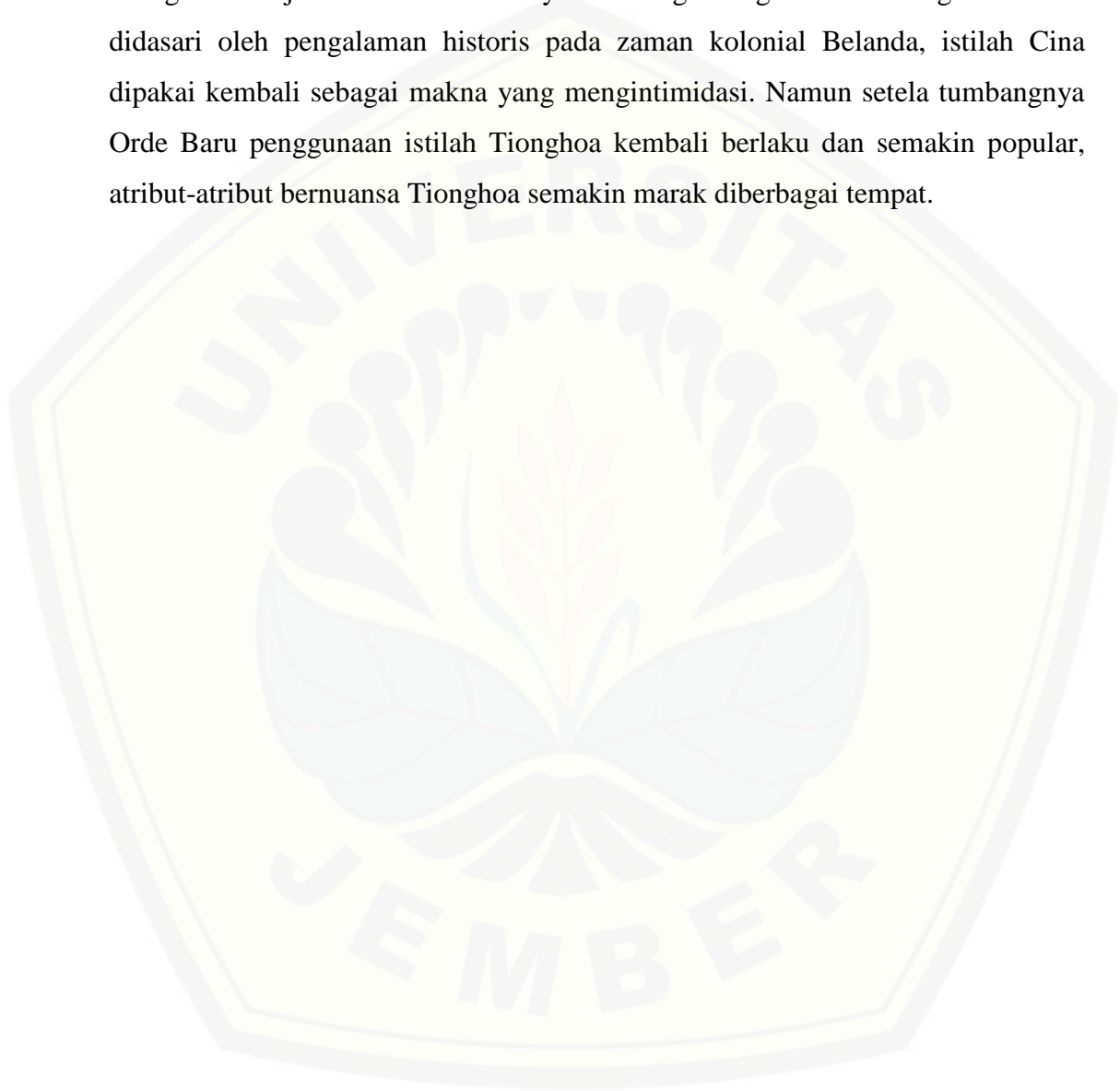
Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan kebenaran setiap informasi.

Makassar, 12 Oktober 2015

Responden

(Ko Fanny)

Sejak orde baru istilah Tionghoa tidak pernah terpakai sebagai sebuah wacana untuk mengapresiasi esensi kemanusiaan. Istilah Tionghoa ini diganti dengan istilah Cina. Hal ini merupakan bukti penghinaan mereka terhadap Tionghoa. Tetapi pada tahun 1966 pemerintah Orde Baru mengambil suatu kebijakan terhadap etnis minoritas yang dianggap berbahaya dan menggantikan Tionghoa menjadi Cina untuk menyebut orang Tionghoa dan Tiongkok. Entah didasari oleh pengalaman historis pada zaman kolonial Belanda, istilah Cina dipakai kembali sebagai makna yang mengintimidasi. Namun setelah tumbang Orde Baru penggunaan istilah Tionghoa kembali berlaku dan semakin populer, atribut-atribut bernuansa Tionghoa semakin marak diberbagai tempat.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tong Hong Siek  
Umur : 68 tahun  
Pekerjaan : Kepala Klenteng Kwan Kong  
Alamat : Jl. Sulawesi

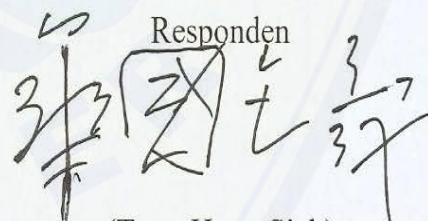
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Kinanthi Nisful Laily  
NIM : 110210302003  
Fakultas/Prodi : FKIP/ Pendidikan Sejarah

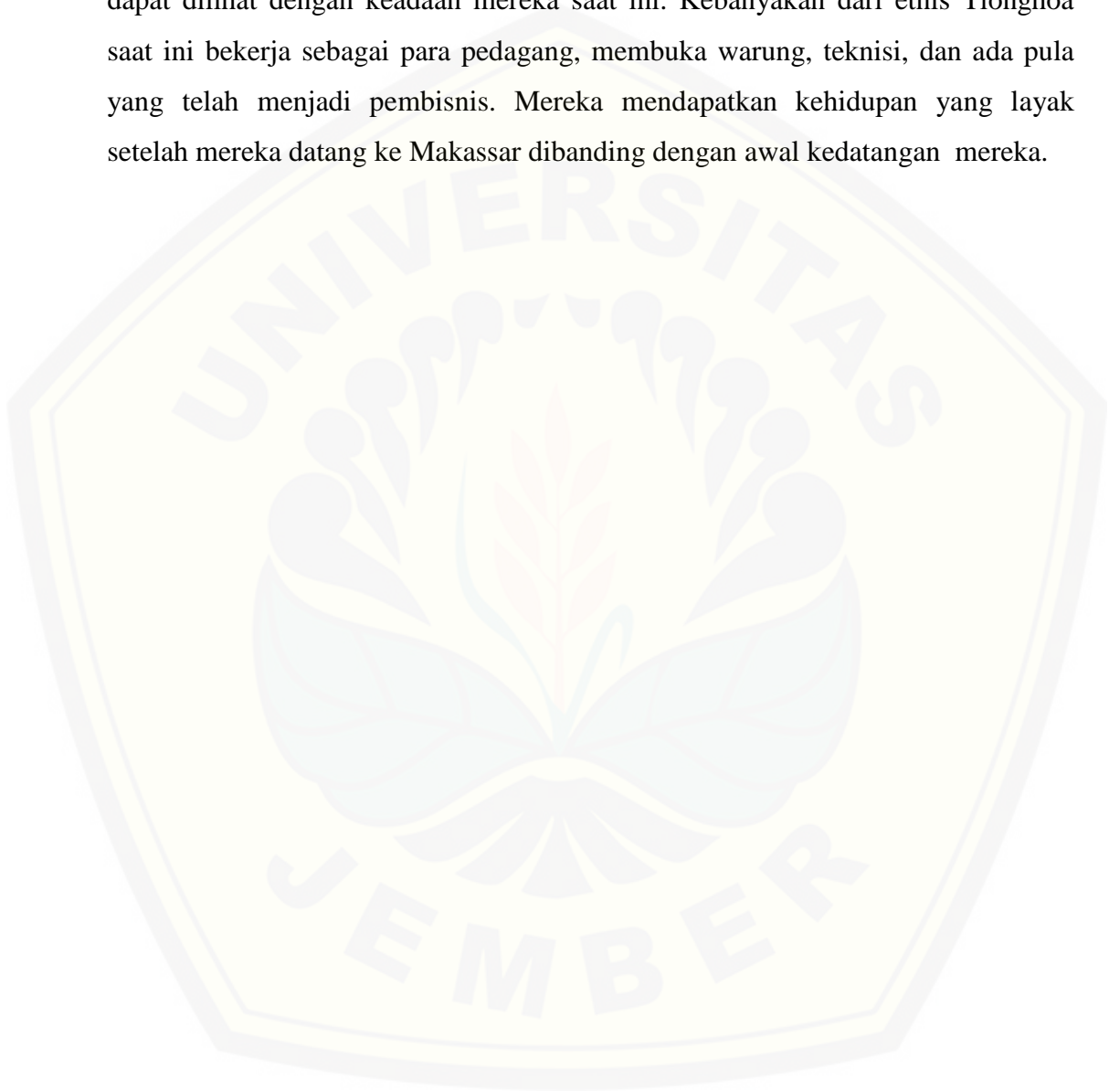
Benar-benar telah mengadakan wawancara penelitian guna melengkapi sumber-sumber data penelitian skripsi yang berjudul *Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar Pada Masa Orde Baru (1966-1998)*

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan kebenaran setiap informasi.

Makassar, 13 Oktober 2015

Responden  
  
(Tong Hong Siek)

Awal kedatangan Tiongoa ke Indonesia khususnya Makassar pada umumnya sangat melarat. Mereka datang untuk mengubah nasib mereka dan menaruh harapan besar pada tempat perantauan yang dituju. Awalnya kebanyakan dari orang Tionghoa yang datang ke Makassar tidak memiliki bakat apapun. jadi mereka berjuang untuk hidup di tanah perantauan dengan tekad bekerja keras. Ini dapat dilihat dengan keadaan mereka saat ini. Kebanyakan dari etnis Tionghoa saat ini bekerja sebagai para pedagang, membuka warung, teknisi, dan ada pula yang telah menjadi pembisnis. Mereka mendapatkan kehidupan yang layak setelah mereka datang ke Makassar dibanding dengan awal kedatangan mereka.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tong Hong Pue  
Umur : 42 tahun  
Pekerjaan : Pemimpin doa dalam pembakaran Klenteng Kwan Kong  
Alamat : Jl. Sulawesi

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

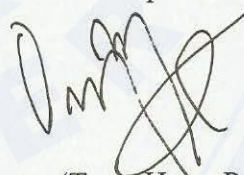
Nama : Kinanthi Nisful Laily  
NIM : 110210302003  
Fakultas/Prodi : FKIP/ Pendidikan Sejarah

Benar-benar telah mengadakan wawancara penelitian guna melengkapi sumber-sumber data penelitian skripsi yang berjudul *Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar Pada Masa Orde Baru (1966-1998)*

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan kebenaran setiap informasi.

Makassar, 13 Oktober 2015

Responden



(Tong Hong Pue)

Nilai-nilai yang ada di etnis Tionghoa masih berasa kekentalannya pada awal kedatangan mereka. Namun karena adanya proses adaptasi dengan masyarakat Makassar maka nilai-nilai kebudayaan mereka sedikit berkurang. Contohnya pada awal kedatangan mereka masih menggunakan bahasa Mandarin tapi karena diharuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia maka mereka mengurangi percakapan mereka dengan bahasa Mandarin tetapi terkadang masih digunakan dalam percakapan keluarga.

Adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan sekolah pecinaan atau Tionghoa yang digantikan dengan umum ini membuat proses adaptasi lebih mudah dan berkembang. Usaha mereka untuk beradaptasi terhadap masyarakat sekitar juga membuahkan hasil yaitu ada beberapa yang menikah dengan masyarakat setempat. Hasil dari perkawinan itu menghasilkan Tionghoa peranakan. Tionghoa peranakan ini telah berkembang hingga saat ini.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ing

Umur : 47 tahun

Pekerjaan : Umat Klenteng Si Naga Sakti Xiang Ma dan Masyarakat  
pecinaan

Alamat : Jl. Lembeh

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Kinanthi Nisful Laily

NIM : 110210302003

Fakultas/Prodi : FKIP/ Pendidikan Sejarah

Benar-benar telah mengadakan wawancara penelitian guna melengkapi sumber-sumber data penelitian skripsi yang berjudul *Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar Pada Masa Orde Baru (1966-1998)*

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan kebenaran setiap informasi.

Makassar, 14 Oktober 2015

Responden



(Ing)



Keadaan di jalan Sulawesi Makassar pada masa orde baru pada saat itu adalah kekacauan. Dimulai dengan permasalahan dengan masyarakat setempat dilema kewarganegaraan, kelangsungan hidup, adaptasi dengan masyarakat setempat, juga harus selalu bersiap menghadapi segala sesuatu yang dirasa bisa datang kapan saja.

Jadi dapat dikatakan bahwa pada zaman itu menjadi zaman yang kelam bagi etnis Tionghoa untuk bertahan hidup di tempat perantauannya. Dari berbagai permasalahan tadi tidak sedikit yang memilih pergi dari Makassar, namun ada pula yang masih bertahan sampai sekarang. Ini membuktikan bahwa mereka bekerja keras untuk bertahan di Indonesia dengan segala konsekuensinya.

Etnis Tionghoa sempat terombang-ambing akibat kebijakan pemerintah yang harus menentukan mereka bertahan atau kembali. Hingga pada akhirnya mereka saat ini berkembang pesat di Makassar dengan menempati kompleks rumah yang bernuansa Tionghoa untuk mempersatukan kelompok mereka.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Handayani (Sun Choung In)

Umur : 52 tahun

Pekerjaan : Penjual Gorengan

Alamat : Jl. Sulawesi

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Kinanthi Nisful Laily

NIM : 110210302003

Fakultas/Prodi : FKIP/ Pendidikan Sejarah

Benar-benar telah mengadakan wawancara penelitian guna melengkapi sumber-sumber data penelitian skripsi yang berjudul "*Dinamikan Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar Pada Masa Orde Baru (1966-1998)*"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan kebenaran setiap informasi.

Makassar, 10 Oktober 2015

Responden



(Handayani)

Pada permulaan masuk Islam untuk kegiatan keagamaan (belajar agama Islam) selalu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, takut diketahui oleh komunitas Tionghoanya. Masuk Islam karena keinginannya yang telah mendengar penuturan suaminya tentang keindahan dan Islam. Selanjutnya didukung pula oleh lingkungan sekitar rumah.



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gunawan (orang Tionghoa)  
Umur : 49 tahun  
Pekerjaan : Penjaga Perpustakaan Umum Makassar  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin KM 7 Talalsalampang Makassar

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

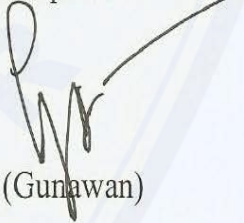
Nama : Kinanthi Nisful Laily  
NIM : 110210302003  
Fakultas/Prodi : FKIP/ Pendidikan Sejarah

Benar-benar telah mengadakan wawancara penelitian guna melengkapi sumber-sumber data penelitian skripsi yang berjudul “Dinamikan *Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar Pada Masa Orde Baru (1966-1998)*”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan kebenaran setiap informasi.

Makassar, 15 Oktober 2015

Responden



(Gunawan)

Memeluk Islam karena keadaan dan juga pergaulan dengan pribumi yang beragama Islam. Dengan beragama Islam maka lebih mudah untuk diterima didalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Sebelumnya dengan beragama Budha, tetap saja dikelompokkan sebagai kelas dua dalam menerima pekerjaan . Ketentuan di Islam diatur dengan jelas barisan-barisan yang boleh dan tidak boleh (halal dan haram) seperti tidak diperbolehkan minum-minuman keras, memakankan makanan yang diharamkan, berbohong dan berjudi. Kejelasan itulah yang membuat saya bertekad untuk pindah agama ke Islam.



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alim  
Umur : 45 tahun  
Pekerjaan : Berdagang Sop Konro  
Alamat : Jl. Sulawesi

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Kinanthi Nisful Laily  
NIM : 110210302003  
Fakultas/Prodi : FKIP/ Pendidikan Sejarah

Benar-benar telah mengadakan wawancara penelitian guna melengkapi sumber-sumber data penelitian skripsi yang berjudul “Dinamikan *Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar Pada Masa Orde Baru (1966-1998)*”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan kebenaran setiap informasi.

Makassar, 16 Oktober 2015

Responden



(Alim)

Meskipun telah memilih Islam sebagai agama yang saya anut tetap saja perilaku buruk sukar untuk dihindari ataupun ditinggalkan seperti berjudi. Begitu juga dalam ziarah kubur Cheng Beng atau Qing Ming (bersih dan tenang. Pada perayaan Cheng Beng dalam tradisi Tionghoa para anggota keluarga melakukan ziarah kubur dan pembersihan kubur. Selanjutnya melakukan sembahyang untuk arwah keluarga dan leluhur lengkap dengan berbagai sajian) masih melakukannya demi untuk menghormati keluarga besar.



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amirulah (suku Bugis)

Umur : 47 tahun

Pekerjaan : Bengkel

Alamat : Depan Benteng Fort Rotterdam

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Kinanthi Nisful Laily

NIM : 110210302003

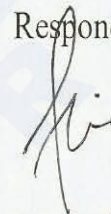
Fakultas/Prodi : FKIP/ Pendidikan Sejarah

Benar-benar telah mengadakan wawancara penelitian guna melengkapi sumber-sumber data penelitian skripsi yang berjudul “Dinamikan *Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar Pada Masa Orde Baru (1966-1998)*”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan kebenaran setiap informasi.

Makassar, 16 Oktober 2015

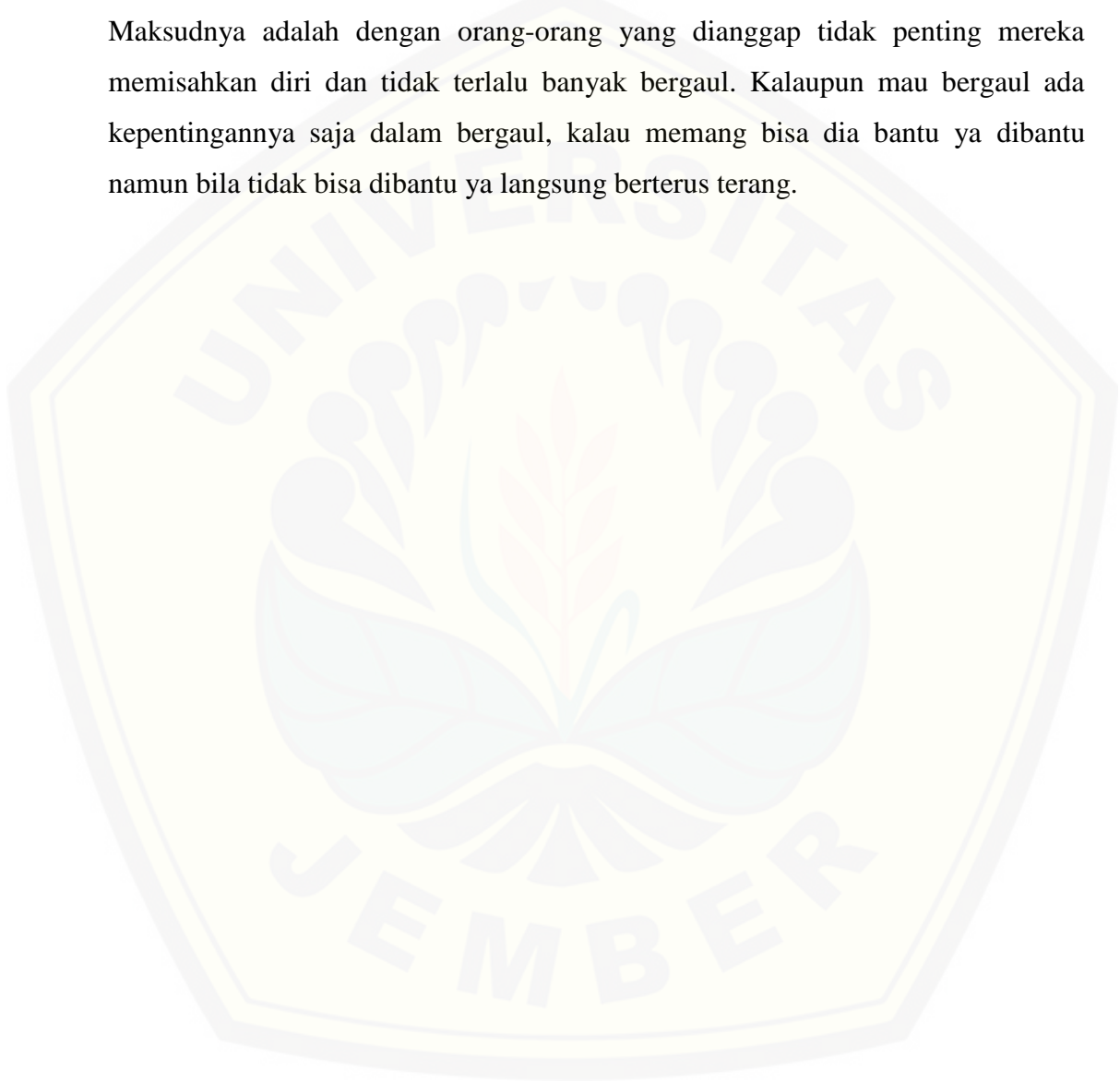
Responden



(Amirulah)



Orang Tionghoa memiliki nilai-nilai yang kokoh sebagai pekerja di Makassar, dimana di Makassar sendiri untuk bertahan dalam suatu pekerjaan sangatlah sulit. Etnis Tionghoa memiliki sifat pantang menyerah, berbeda dengan nilai-nilai yang ada dipribumi yang suka bermalas-malasan kalau sudah banyak memiliki uang. Seterusnya rata-rata orang Tionghoa yang berada di Makassar baik dan ramah tetapi kadang kebalikannya kadangkala tergantung pada keadaan. Maksudnya adalah dengan orang-orang yang dianggap tidak penting mereka memisahkan diri dan tidak terlalu banyak bergaul. Kalaupun mau bergaul ada kepentingannya saja dalam bergaul, kalau memang bisa dia bantu ya dibantu namun bila tidak bisa dibantu ya langsung berterus terang.



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harry Y  
Umur : 56 tahun  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Depan Benteng Fort Rotterdam

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama : Kinanthi Nisful Laily  
NIM : 110210302003  
Fakultas/Prodi : FKIP/ Pendidikan Sejarah

Benar-benar telah mengadakan wawancara penelitian guna melengkapi sumber-sumber data penelitian skripsi yang berjudul "*Dinamikan Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar Pada Masa Orde Baru (1966-1998)*"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan kebenaran setiap informasi.

Makassar, 18 Oktober 2015

Responden

  
(Harry Y)

Pada pandangan saya nilai-nilai pribumi masih sangat kuat dalam menjunjung tinggi adat budaya. Hal ini juga sama dengan orang Tionghoa yang masih menjunjung tinggi nilai leluhur Tiongkok. Pemikiran orang pribumi kadang-kadang sempit yang menilai bahwa orang Tionghoa hidup semata-mata demi uang, tidak mau bergaul dengan pribumi dan tidak cinta ke Indonesia. Padahal tidak semua yang disangka oleh pribumi itu benar.



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gunawan (orang Tionghoa)  
Umur : 49 tahun  
Pekerjaan : Penjaga Perpustakaan Umum Makassar  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin KM 7 Talalsalapang Makassar

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

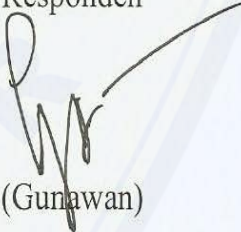
Nama : Kinanthi Nisful Laily  
NIM : 110210302003  
Fakultas/Prodi : FKIP/ Pendidikan Sejarah

Benar-benar telah mengadakan wawancara penelitian guna melengkapi sumber-sumber data penelitian skripsi yang berjudul “Dinamikan *Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa di Makassar Pada Masa Orde Baru (1966-1998)*”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan kebenaran setiap informasi.

Makassar, 15 Oktober 2015

Responden



(Gunawan)

Menurut saya pribumi itu secara umum baik-baik. Saya saya dalam berhubungan tidak banyak masalah dan memiliki banyak teman pribumi dari berbagai etnis. Saya nyaman berkawan dengan masyarakat pribumi karena hal ini sudah dibiasakan oleh orang tua saya semenjak kecil terhadap anak-anaknya. Bahkan dua orang dari saudara saya menikah dengan masyarakat pribumi dan memiliki anak yang diberi nama keturunan Bugis.



**Lampiran G: Biodata Narasumber**

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1	Tang	62 tahun	Mantan aktivis Makassar Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI)
2	Robet	48 tahun	Pemilik took
3	Che	38 tahun	Penjaga Klenteng Kwan Kong
4	Ko Fanny	57 tahun	Pengurus Klenteng Si Naga Sakti Xiang Ma (Petugas informasi)
5	Tong Hong Siek	68 tahun	Kepala Klenteng Kwan Kong
6	Tong Hong Pue	42 tahun	Pemimpn doa dalam pembakaran Klenteng Kwan Kong
7	Ing	47 tahun	Umat Klenteng Si Naga Sakti Xiang Ma dan Masyarakat pecinaan
8	Handayani (Sun Choung In)	52 tahun	Penjual Gorengan
9	Gunawan	49 tahun	Penjaga Perpustakaan Umum Makassar
10	Alim	45 tahun	Berdagang Sop Konro
11	Amirulah (Bugis)	47 tahun	Bengkel
12	Harry Y	56 tahun	Pedagang
13	Cristina	21 tahun	Mahasiswa Universitas Hasannudin

Lampiran G:Gambar



Gambar 3. Suasana Makassar masa Kolonial  
([gnp.rssing.com](http://gnp.rssing.com))



Gambar 4. Foto keluarga masa Orde Lama  
([commons.wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org))



Gambar 5. Foto Etnis Tionghoa dan pribumi generasi kedua ketiga pada tahun 1967

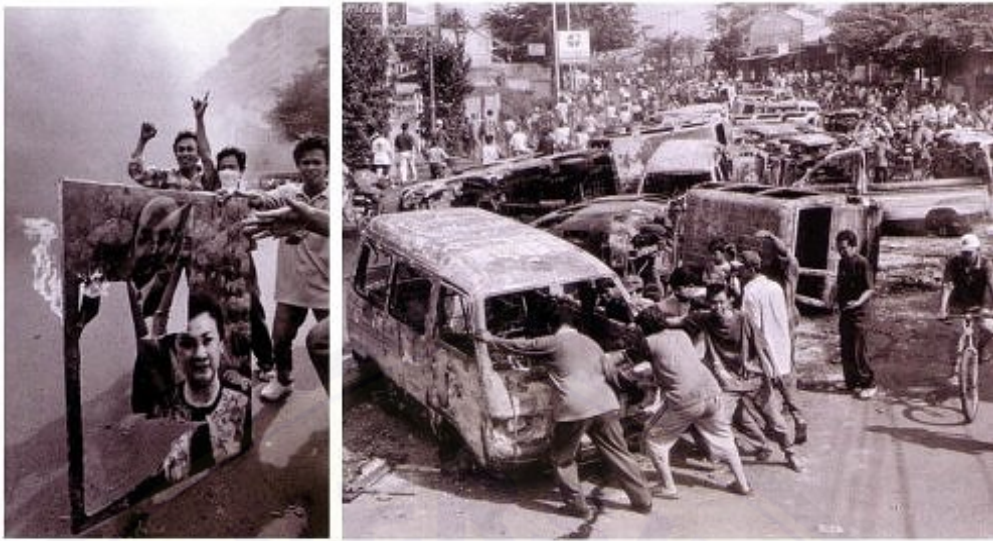
([id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org))



Gambar 6. Kerusuhan 1998, Etnis Tionghoa menjadi bulan-bulanan masyarakat setempat

([www.tionghoa.info](http://www.tionghoa.info))





Gambar 7. Kerusakan Orde Baru, pembakaran terhadap semua yang berhubungan dengan etnis Tionghoa  
([bagindaery.blogspot.com](http://bagindaery.blogspot.com))



Gambar 8. Etnis Tionghoa di Masa Orde Baru yang berdoa di rumah masing-masing akibat larangan dan konflik yang terjadi kala itu  
([www.tionghoa.info](http://www.tionghoa.info))



Gambar 9. Tempat pemujaan di Vihara Klenteng Si Naga Sakti Xiang Ma  
(Hasil dokumentasi penelitian lapangan)



Gambar 10. jemaat yang sedang melakukan ibadah di Klenteng  
(Hasil dokumentasi penelitian lapangan)



Gambar 11. Wawancara dengan petugas Klenteng  
(Hasil dokumentasi penelitian lapangan)



Gambar 12. Perayaan hari *Ceng Beng* untuk menghormati leluhur yang telah mendahului  
([www.tionghoa.info](http://www.tionghoa.info))